



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Jawa Timur, Indonesia



<https://www.blitarkab.go.id>



[admin@blitarkab.go.id](mailto:admin@blitarkab.go.id)



Telepon (0342) 555955

## KATA PENGANTAR

LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah. LKjIP Tahun 2019 adalah tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan, penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 rata-rata sebesar 104,38% atau kategori **SANGAT BERHASIL**, dengan tingkat nilai efisiensi sebesar 136,71%. Dari 22 indikator kinerja, sebanyak 17 atau 77% dapat dicapai dengan Sangat Berhasil (di atas 100%), sebanyak 4 indikator atau 18% dicapai dengan Berhasil dan sisanya 1 indikator atau 5% dicapai dengan Cukup Berhasil. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih rendah dan memerlukan tindak lanjut kebijakan perbaikan di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penyelarasan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan dan membangun sistem pengelolaan data kinerja terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar

Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridlo kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar untuk Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing dapat tercapai.

Blitar, Maret 2020  
BUPATI BLITAR  
  
Drs. RIJANTO, MM



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Dasar Hukum.....	10
1.5 Isu-Isu Strategis.....	11

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	14
2.3 Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021.....	21

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja.....	25
3.2 Serapan Anggaran.....	79

### BAB IV PENUTUP DAN KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Tindak Lanjut.....	87





# BAB **1** PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

*Good public governance* (GPG) menjadi pilar penting dalam mencapai akuntabilitas kelembagaan pemerintahan. *Good public governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme tahapan teknis, substantif dan koordinasi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan pelaporan kinerja, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis

### **Bab 1 Berisi:**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Daerah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Dasar Hukum
- E. Isu-isu Strategis



pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Blitar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD ini memiliki sebanyak 6 misi yang diuraikan ke dalam 12 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Penetapan sasaran strategis Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kinerja Bupati Blitar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019. Pencapaian sasaran strategis tahun 2019 tersebut dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 yang memberikan prioritas kepada 136 program kegiatan yang salah satu diantaranya adalah Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. Pencapaian prioritas program diwujudkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Blitar Tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan berbagai kebijakan strategis dalam meningkatkan capaian Nilai SAKIP antara lain: 1) melakukan *refocusing* program dan kegiatan dengan melakukan penataan dan efisiensi program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bliitar yang sudah ditetapkan; 2) meningkatkan sinkronisasi cross cutting dan cascading indikator kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah, eselon III, IV sampai ke

indikator kinerja individu bagi staf melalui proses bisnis; 3) menerapkan sistem manajemen manajemen data kinerja dalam rangka mengukur capaian kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dikendalikan; dan 4) mendorong setiap perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga berupaya terus meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran strategis, melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan dilandasi semangat Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

## 1.2. Gambaran Umum

### Letak Geografis

Kabupaten Blitar yang secara geografis terletak antara  $111^{\circ}40'-112^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58' - 8^{\circ}9'5''$  Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Posisi geografis strategis ini menjadikan salah satu kabupaten yang berkembang di bagian selatan Propinsi Jawa Timur.



**Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar**

Dengan ketinggian  $\pm 167$  meter dan luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan, kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagian utara memiliki kemiringan yang bervariasi, yaitu 2% - 15%, 15% - 40% dan diatas 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2. Bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Sisi timur bagian ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3. Bagian selatan merupakan wilayah yang sebagian besar berupa perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari daerah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20 persen dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tufa dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan,

sebagian Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggunrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah  $\pm$  50 persen dari luas wilayah Kabupaten Blitar.

Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan Juni sampai Oktober. Sedangkan musim penghujan antara bulan November sampai Mei dengan jumlah curah hujan 2.467 hingga 8.282 mm/bulan. Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi pegunungan, terletak pada bagian Blitar utara dengan ketinggian mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang, Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk dari letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Ponggok, sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada wilayah Blitar bagian selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter di atas permukaan air laut (dpl) hingga mencapai 350 meter dpl. Morfologi tersebut umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi kecamatan Panggunrejo, Wates, dan Wonotirto.

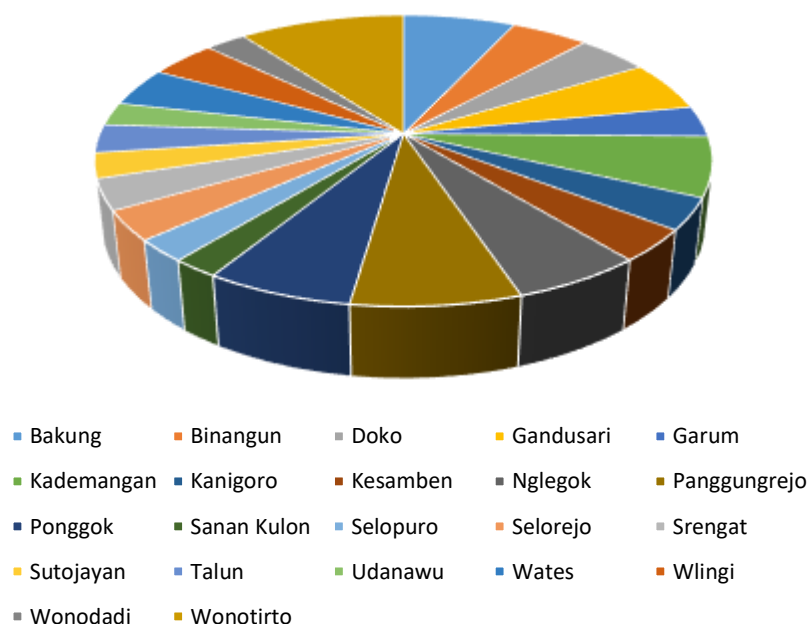
Adapun morfologi dataran terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar yang dibentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat, dengan kemiringan antara 0 sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi Kecamatan Wonodadi, sebagian Kademangan, Srengat, Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro dan Selorejo.

### **Wilayah Administratif dan Demografi**

Secara administratif, Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 220 desa, yang terbagi lagi kedalam wilayah RW dan RT dengan pembagian luas wilayah dalam Km<sup>2</sup> sebagai berikut :

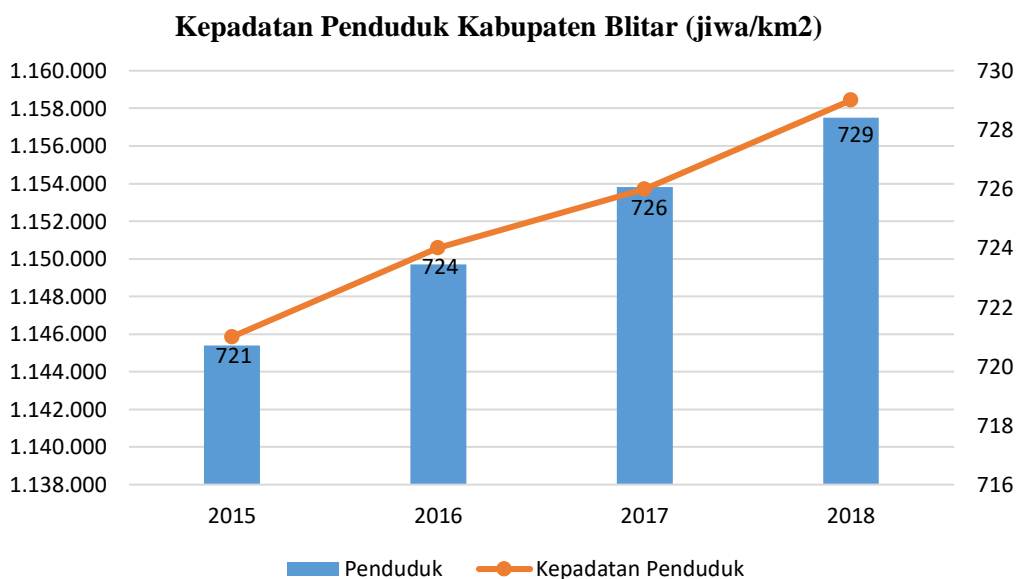


### Luas Kecamatan



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, 2019 (diolah)

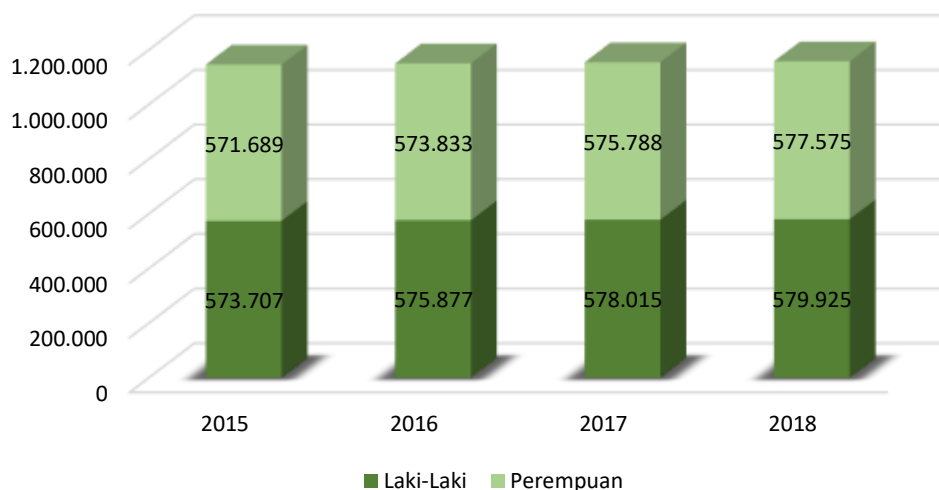
Sedang jumlah penduduk Kabupaten Blitar tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7,54% yakni dari 1.153.803 jiwa menjadi 1.240.762 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan yang terdiri atas 28 kelurahan dan 220 desa. Kepadatan penduduk Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana pada tahun 2019 adalah sebanyak 729 jiwa/km<sup>2</sup> luas wilayah, untuk lebih detail dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2019 (diolah)

Adapun perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebagai berikut:

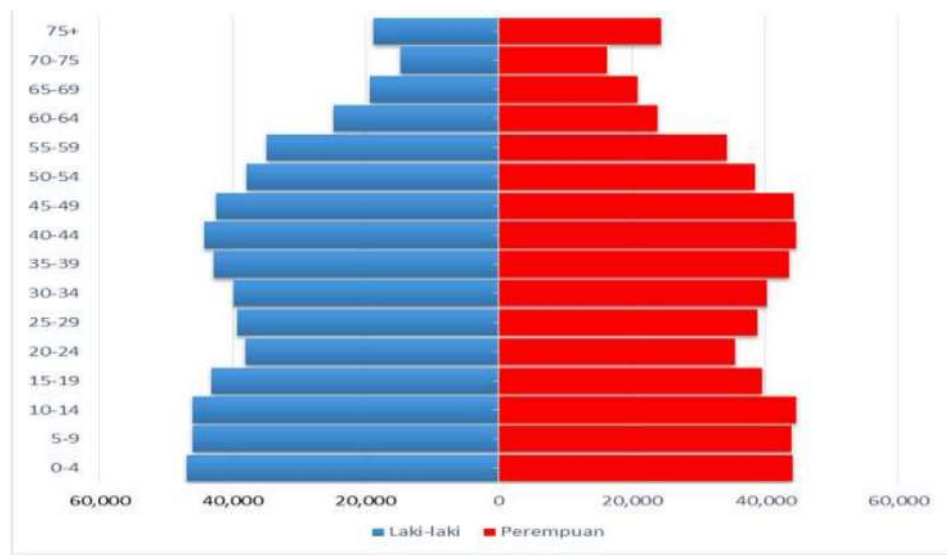
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa)**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2019 (diolah)

Tren peningkatan penduduk terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, namun secara kecepatan mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar 2019 sebesar 0,32 persen, terus mengalami perlambatan, dengan laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,33%) lebih besar daripada penduduk perempuan (0,31%). Terkendalanya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup.

Untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan usia, disajikan piramida penduduk pada gambar berikut. Piramida penduduk sangat penting untuk melihat rasio ketergantungan penduduk. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya masuk kategori bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang merupakan usia angkatan kerja.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2019 (diolah)

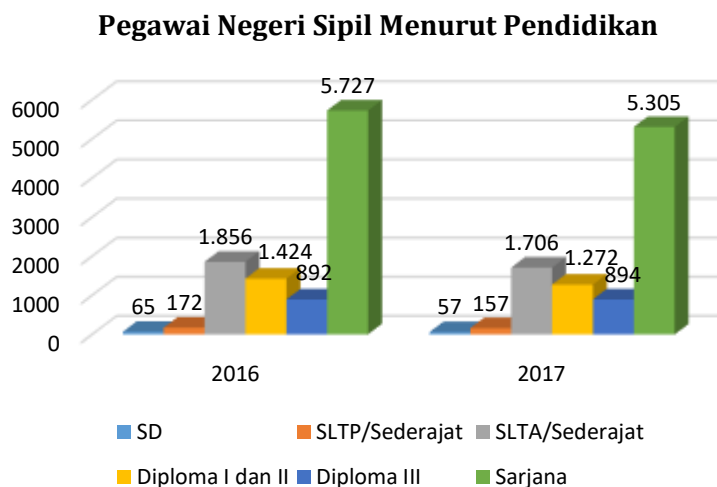
Dari gambar piramida penduduk diatas kita bisa simpulkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (66,62%) masih cukup dominan dibandingkan dengan penduduk usia <15 tahun (23,49%) maupun usia lansia (9,89%). Jika dihitung nilai rasio ketergantungan penduduk dihasilkan angka 50,11. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap dua orang yang berusia kerja dan produktif menanggung satu orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi. Kondisi demografis penting lainnya adalah tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah yang ada, sehingga dapat diketahui bagaimana persebaran penduduk dilihat dari batas administrasi yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan mengetahui tingkat kepadatan penduduk maka dapat ditentukan arah, prioritas dan pola ruang pembangunan setiap wilayah kecamatan.

### Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati. Selain itu, Bupati dibantu pula oleh Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan.

## Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk kualitas tenaga kerja atau SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus diupayakan semakin ditingkatkan. Secara keseluruhan pada tahun 2016 jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar turun sebesar 7,35 persen dibandingkan tahun 2017 menjadi 9.391 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Blitar terdiri atas orang-orang dengan berbagai jenjang pendidikan yang dijelaskan pada Gambar berikut:



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi pendidikan Sarjana menempati urutan pertama dengan jumlah **5.727 pegawai** dari total 9.391 pegawai dan mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 422 pegawai. Kemudian diikuti oleh PNS dengan pendidikan SLTA ke bawah dengan jumlah **1.920 pegawai** yang menurun bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 2.093 pegawai. Selanjutnya untuk PNS dengan ijazah **D1,D2,D3,D4** berjumlah **2.166 pegawai** yang menurun bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 2.316 pegawai.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar selama satu tahun kerja, dengan tujuan :

- a. Sebagai laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat;

- b. Memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019, yang merupakan periode tahun ketiga dalam kerangka perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2022;
- c. Memberikan informasi capaian sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2019 guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berikutnya;
- d. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **1.4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.5. Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan serta kesinambungan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik kecepatan/daya tanggap, ketepatan, serta akurasi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan (*Gerakan Ekonomi Kreatif*), penanganan kemiskinan, tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan, penanaman yang kuat pada pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan religiusitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan prima masyarakat.

Permasalahan Pemerintah Kabupaten Blitar serta kemungkinan permasalahan yang timbul di tahun-tahun selanjutnya dalam menghadapi peluang dan tantangan baik lokal maupun global perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang disusun mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Adapun isu strategis berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 yaitu :

1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan;
4. Peningkatan sumber daya manusia (SDM);
5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Pengembangan potensi pariwisata;



7. Kerjasama konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah;
8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.



## BAB **2** PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana strategis didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu sebagai berikut:

#### Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Blitar tahun 2006 - 2026, Visi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 adalah : **“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”** Adapun makna visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- **Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

#### **Bab 2 Berisi:**

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja

C. Matriks RPJMD

- **Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- **Berdaya Saing**, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

## **MISI**

Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu :

1. *Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;*
2. *Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;*
3. *Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);*
4. *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;*
5. *Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;*
6. *Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.*

## **2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. RPJMD. Sedangkan, penyusunan LKjIP tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD ini memiliki 6 misi yang diuraikan ke dalam 12 sasaran strategis dan 22 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal sebagai prioritas pembangunan daerah, yang pencapaian dilakukan melalui serangkaian strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan *good and clean governance*, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-3 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :

## PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	1	Angka kemiskinan (%)	9,37
		2	Pendapatan per kapita (juta rupiah/Orang/Tahun)	30,8
		3	Indeks daya beli	0,69
		4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,61
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	1	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	81,92
3	Terwujudnya stabilitas wilayah	1	Persentase penanganan konflik (%)	100
		2	Persentase penegakan PERDA (%)	95
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	1	Indeks Pendidikan	0,62
5	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Indeks Kesehatan	0,8170
6	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender	77,20
7	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	B
		2	Nilai LPPD	30,530
		3	Opini BPK	WTP
8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik
9	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	1	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB (%)	6,63
		2	Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	6,63
		3	Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB (%)	3,05
		4	Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	3.486.498.975
10	Meningkatnya pelayanan perijinan	1	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik
11	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68
		2	Presentase Ketaatan Tata Ruang (%)	80
12	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1	Persentase desa berstatus pratama (%)	0,91

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.830.894.384,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.637.827.004,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.656.026.847,00
4	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian	3.142.413.905,00
<b>I. DINAS PENDIDIKAN</b>		
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.820.000.000,00
6	Program Pendidikan Sekolah Dasar	88.199.836.974,00
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	929.100.000,00
8	Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.587.121.000,00
<b>II. DINAS KESEHATAN</b>		
9	Program Pelayanan Kesehatan	139.434.969.260,00
10	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	13.967.024.900,00
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	26.570.624.000,00
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak	2.410.000.000,00
<b>III. RSUD</b>		
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD	78.865.911.208,00
14	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	1.600.000.000,00
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan	5.362.384.000,00
<b>IV. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
16	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	164.541.086.416,00
17	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	20.577.600.000,00
18	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	45.020.104.000,00
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	16.804.866.667,00
20	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan	23.550.000.000,00
21	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.485.600.000,00
22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur	4.500.000.001,00
<b>V. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
23	Program Pengembangan Perumahan	784.778.000,00
24	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	23.079.898.000,00
25	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	9.029.787.000,00
26	Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	10.355.360.000,00
<b>VI. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
27	Program Pemeliharaan Kantrantibmas	755.000.000,00
28	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.824.700.000,00
29	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	442.000.000,00
30	Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat	520.000.000,00
31	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan	1.083.331.260,00
32	Program Pencegahan dan Penanganan Konflik	1.754.360.765,00
33	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol	1.062.300.512,00
34	Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik	696.427.238,00
35	Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1.175.000.000,00
36	Program Kedaruratan dan Logistik	350.000.000,00
37	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.225.000.000,00
<b>VII. DINAS SOSIAL</b>		
38	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.200.000.000,00



39	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1.200.000.000,00
40	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	1.300.000.000,00
41	Program Pemberdayaan Sosial	350.000.000,00
<b>VIII. DINAS TENAGA KERJA</b>		
42	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	307.515.000,00
43	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	450.000.000,00
44	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	945.100.500,00
45	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	437.360.000,00
<b>IX. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
46	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	824.623.400,00
47	Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak	849.976.500,00
48	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.550.444.000,00
49	Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender	515.275.000,00
<b>X. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>		
50	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.527.330.000,00
51	Program Peningkatan Mutu Produk Pangan	450.000.000,00
52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	4.962.973.000,00
53	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	1.455.000.000,00
54	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian	2.233.453.000,00
55	Program Pengembangan SDM Pertanian	1.350.000.000,00
56	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	640.000.000,00
57	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura	1.330.000.000,00
58	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan	1.115.085.000,00
<b>XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
59	Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	585.000.000,00
60	Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	197.000.000,00
61	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	300.000.000,00
62	Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	2.253.000.000,00
63	Program Pengelolaan Kebersihan Pertamanan	9.162.338.000,00
<b>XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
64	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	246.003.258,00
65	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	171.480.000,00
66	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.602.225.400,00
67	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	3.376.854.600,00
<b>XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
68	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	2.302.780.000,00
69	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	750.000.000,00
70	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	2.325.000.000,00
71	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat desa	1.632.220.000,00
<b>XIV. DINAS PERHUBUNGAN</b>		
72	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	159.505.500,00
73	Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1.957.135.000,00
74	Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan	1.623.134.642,00
<b>XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
75	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	727.187.400,00
76	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika	4.109.219.400,00

77	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	600.000.000,00
78	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	236.413.500,00
79	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	11.175.000,00
<b>XVI. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>		
80	Program Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pendukung Usaha	300.000.000,00
81	Program Produksi dan Rekonstruksi Usaha Mikro dan Koperasi	609.000.000,00
82	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	500.000.000,00
83	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	628.073.025,00
84	Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan	480.000.000,00
<b>XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
85	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	399.100.000,00
86	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	349.100.000,00
87	Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	410.000.000,00
88	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	574.704.804,16
<b>XVIII. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		
89	Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olah Raga	1.284.000.000,00
90	Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya	1.890.000.000,00
91	Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	4.445.906.724,00
92	Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.730.000.000,00
<b>XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b>		
93	Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	760.652.000,00
94	Program Layanan dan Pelestarian Arsip	374.427.000,00
<b>XX. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>		
95	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	761.575.000,00
96	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	622.600.000,00
97	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	855.273.883,00
98	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.282.200.217,00
99	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	160.000.000,00
100	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan	600.000.000,00
101	Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan	857.000.000,00
<b>XXI. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		
102	Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan	419.473.220,00
103	Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen	172.135.000,00
104	Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal	57.000.000,00
105	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	4.531.329.000,00
106	Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD	268.275.000,00
107	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	150.000.000,00
108	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	100.000.000,00
<b>XXII. SEKRETARIAT DAERAH</b>		
109	Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.581.190.000,00
110	Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	2.236.849.400,00
111	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	289.000.000,00
112	Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	280.000.000,00
113	Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum	683.419.000,00
114	Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengedalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.246.716.000,00
115	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	197.000.000,00

116	Program Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	1.366.125.000,00
117	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Knerja Aparatur Pemerintah	1.128.584.000,00
118	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala	5.794.350.000,00
119	Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan	1.971.332.800,00
120	Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah	618.378.800,00
<b>XXIII. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		
121	Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	2.558.099.000,00
122	Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.000.000.000,00
123	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	1.585.000.000,00
124	Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah	1.040.690.528,00
<b>XXIV. SEKRETARIAT DPRD</b>		
125	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi	6.733.395.000,00
126	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi	9.107.173.750,00
127	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi	4.783.770.000,00
128	Program Penguatan Kelembagaan DPRD	10.562.002.500,00
<b>XXV. KECAMATAN</b>		
129	Program Fasilitasi Pemerintah Desa dan Kelurahan	23.418.509.657,00
130	Program Pelayanan Kecamatan	435.921.071,00
<b>XXVI. INSPEKTORAT</b>		
131	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	2.591.195.000,00
<b>XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
132	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Pendek	100.000.000,00
133	Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	2.023.085.000,00
134	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	893.000.000,00
135	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	961.050.000,00
136	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	656.900.000,00
137	Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	452.995.000,00
138	Program Penelitian dan Pengembangan	1.893.453.000,00
<b>XXVIII. BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
139	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan	4.185.450.000,00
140	Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan	1.791.600.000,00
141	Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	1.135.050.000,00
142	Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan pendapatan	815.550.000,00
<b>XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
143	Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai	1.060.118.000,00
144	Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur	887.140.000,00
145	Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/ Infomasi Kepegawaian	1.405.176.000,00
146	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	2.868.080.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.002.088.561.320,16</b>

## 2.3. Matriks RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

Matriks  
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

VISI: “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”										
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat										
1. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi (%)  2. Indeks Gini	1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	Angka Kemiskinan (%)	9,97	9,88	9,62	9,37	9,12	8,88	8,65
			Pendapatan per kapita (juta rupiah/ Orang/ Tahun)	23,39	25,97	28,24	30,8	33,72	37,31	40,35
			Indeks daya beli	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,70
			Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,79	2,78	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70
		2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	n/a	75,86	78,49	81,92	86,20	91,51	96,74
Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyrakat Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum										
2. Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	Persentase penegakan PERDA	3. Terwujudnya stabilitas wilayah	Persentase penanganan konflik	100	100	100	100	100	100	100
			Pesentase penegakan PERDA	95	95	95	95	95	95	100

Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)										
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	0,60	0,62	0,63	0,64	0,66
		5. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8122	0,8137	0,8154	0,8170	0,8187	0,8203	0,8220
		6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	75,08	75,61	76,13	77,20	77,50	78,10	78,50
Misi IV: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	BB	BB	A
			Nilai LPPD	2,8841	3,0515	3,0525	3,0530	3,0535	3,0540	3,0542
			Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Misi V: Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing										
5.Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	9. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan pada PDRB	6,23	6,23	6,43	6,63	6,83	7,03	7,23
			Persentase pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	6,13	6,13	6,38	6,63	6,88	7,13	7,38

			Persentase pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	4,05	3,21	3,15	3,10	3,05	3,00	3,00
			Jumlah pajak daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp)	1.688.815.031	2.490.356.411	3.112.945.513	3.486.498.975	3.984.159.360	4.607.159.360	4.980.712.822
		10. Meningkatnya pelayanan perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67	68	69	70	71
			Persentase Ketaatan Tata Ruang	75	77	79	80	82	84	85
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Pedesaan										
6. Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa berstatus pratam	12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa berstatus pratama	22,7	20,45	16,36	11,81	7,27	3,64	0





## BAB **3** AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **Bab 3 Berisi:**

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Makro Ekonomi
- E. Analisis Efisiensi
- F. Capaian Prestasi

Sedangkan pemberian kategori pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	> 100%	Lebih dari 100 persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Berhasil</b>
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Kurang Berhasil</b>

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.1. Capaian Kinerja

#### Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	9,37	8,94	104,59%	<b>SB</b>
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah/orang/tahun)	30,8	31,40	101,95%	<b>SB</b>
		3. Indeks Daya Beli	0,69	0,7266	105,30%	<b>SB</b>
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.61	3,11	80,84%	<b>B</b>
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi) (%)	81,92	80,01	97,6%	<b>B</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	100%	<b>SB</b>
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%	100%	<b>SB</b>
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,62	0,5888	93,50%	<b>B</b>
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8170	0,8214	100,50%	<b>SB</b>
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	77,20	79,15	102,53%	<b>SB</b>
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	11. Nilai SAKIP	B	B	100%	<b>SB</b>
		12. Nilai LPPD	30,530	31,238	102,32%	<b>SB</b>
		13. Opini BPK	WTP	WTP	100%	<b>SB</b>
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	100%	<b>SB</b>
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,63%	6,29%	94,87%	<b>B</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	pertanian dan pariwisata	16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,63%	7,78%	117,35%	<b>SB</b>
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3,05%	1,62%	53,11%%	<b>KB</b>
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	3.486.499	5.742.647	164,70%	<b>SB</b>
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%	<b>SB</b>
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68	69,9	102,79%	<b>SB</b>
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	80	80	100%	<b>SB</b>
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	0,91	0,45	150,55%	<b>SB</b>

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan**  
**Strategis 1**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan (%)	9,72	9,37	8,94	104,59%	(0,78)
Pendapatan per kapita (juta rupiah/orang/tahun)	29,52	30,8	31,40	101,95%	1,88
Indeks Daya Beli	0,71	0,69	0,7266	105,30%	0,0166
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,37	2,61	3,11	80,84%	(0,26)
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>98,17%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis Menurunnya Angka Kemiskinan mencapai 98,17% atau Kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Sebanyak 3 indikator target kita tercapai dengan Sangat Berhasil masing-masing Angka Kemiskinan tercapai 104,59%, Pendapatan perkapita penduduk tercapai 101,95% dan Indeks daya beli tercapai 105,30%. Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh berbagai perangkat daerah antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.



Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar menunjukkan perbaikan yang terus meningkat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang semakin menurun, dimana tahun 2016 masih sebesar 9,88% terus menurun menjadi 8,94% pada tahun 2019. Tren angka kemiskinan menurun rata-rata 3,22% selama 4 (empat) tahun terakhir. Jumlah RT miskin sebanyak 118.078. Program prioritas penanganan kemiskinan selain pemberian bantuan PMKS melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 50.186 orang dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) bagi sejumlah 77.165 Kelompok Penerima Manfaat (KPM), juga pengembangan sarana panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Peningkatan kualitas layanan terus dilakukan



Dinas Sosial dengan menerapkan **aplikasi E-PBI** untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK dan membangun **Rumah Singgah**.

Indikator Pendapatan perkapita penduduk juga menunjukkan tren yang meningkat dimana tahun 2016 sebesar Rp.25,52 juta/orang/ tahun menjadi Rp.31,4 juta tahun 2019 atau meningkat rata-rata sebesar 7,16%. Terhadap indikator Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Blitar, juga angka tren naik setiap tahun. Sedangkan, untuk Indikator TPT memiliki capaian kinerja Berhasil (80,84%). Pergeseran peluang kerja dari sektor pertanian ke industri memberikan peningkatan PDRB dan pendapatan masyarakat. Jumlah realisasi investasi tercapai sangat eksponensial dari target Rp.7,75 milyar terealisasi Rp.346.199 milyar dengan jumlah investor 12 perusahaan. Keberhasilan ini dampak dari reformasi proses perijinan yang menjadi hanya 1 hari.

Terkait dengan capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 3,11 % ini menunjukkan angka yang semakin menurun jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 3,37 % atau turun 7,72%. Bahkan angka TPT ini jauh di bawah Angka TPT Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 3,92% dan Nasional sebesar 5,34%. Pergeseran peluang kerja dari sektor agraris ke industri menjadi penyebab adanya pengangguran dimana pemenuhan skill atau ketrampilan pencari kerja di kerja sektor industri masih kurang. Sedangkan, capaian kinerja indikator pendukung ketenagakerjaan lain yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari target 70,61% terealisasi sebesar 72,85% atau tercapai 103,17% dan indikator Pencari Kerja yang Ditempatkan tercapai dengan sangat berhasil yaitu 100,97% dari target 83,18% terealisasi 83,99%. Job fair adalah kegiatan prioritas yang dilaksanakan sebanyak 5 kali yang diikuti sebanyak 160 buah perusahaan dengan jumlah lowongan kerja sebanyak 5.395 orang.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis adalah:

a. Dinas Sosial

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.302.980.000	1.077.677.601	82,71
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1.308.810.000	1.302.759.595	99,54
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	1.415.158.000	1.135.039.480	80,21
Program Pemberdayaan Sosial	614.795.000	575.899.300	93,67
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>4.641.743.000</b>	<b>4.091.375.976</b>	<b>88,14</b>



b. Dinas Tenaga Kerja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	102.500.000	101.376.535	98,90
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	512.765.000	500.588.750	97,63
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	600.000.000	599.655.000	99,94
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.532.080.500	1.530.227.540	99,88
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	406.385.000	388.987.846	95,72
Program Transmigrasi Regional	259.847.500	254.412.775	97,91
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.413.578.000</b>	<b>3.375.248.446</b>	<b>98,88</b>

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	278.300.000	275.770.167	99,09
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	293.750.000	271.252.932	92,34
Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	377.755.000	374.240.849	99,07
Program Peningkatan Promosi dan sistem Informasi	546.254.804	542.269.691	99,27
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>1.496.059.804</b>	<b>1.463.533.639</b>	<b>97,83</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Data kependudukan bersifat sangat dinamis, sehingga updating data secara berkala untuk penyediaan data kebijakan yang bersifat real time masih belum optimal. Selain itu, pemutakhiran data kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk penting dalam proses verifikasi data calon penerima bantuan masih sering terjadi.
2. Pemutakhiran BDT PPFM memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan-bantuan lainnya, masih belum optimal dilakukan.
3. Terbatasnya kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan ODK agar mampu memenuhi fungsi sosialnya (pangan, papan, pendidikan, kesehatan).
4. Masih adanya beberapa panti anak dan lansia yang belum memiliki surat legalitas serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pengurus panti menyebabkan pengelolaan panti anak dan lansia berjalan dengan kurang profesional.

5. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB);
6. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya;
7. Terbatasnya lowongan pekerjaan di wilayah Kabupaten Blitar karena perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar paling banyak adalah perusahaan kecil dan menengah, sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
8. Masih tingginya minat masyarakat Kabupaten Blitar untuk bekerja ke luar negeri, namun perlindungan terhadap CTKI/TKI belum maksimal.
9. Menurunnya kuota transmigran yang ditempatkan karena kuota ditetapkan oleh Provinsi tujuan transmigrasi.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan PMKS antara lain melalui implementasi **aplikasi E-PBI** yang bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK; membangun **Rumah Singgah** yang berfungsi sebagai *shelter* untuk PMKS/PPKS atau penampungan sementara bagi orang terlantar dan anak jalanan hasil operasi gabungan instansi terkait; dan pengoptimalan KUD (Kelompok Usaha Disabilitas) sebagai lembaga pelatihan bagi ODK (Orang Dengan Kecacatan) agar memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual.
2. Melakukan intensifikasi berbagai pelatihan ketrampilan kepada disabilitas dan ODK agar mampu menghasilkan karya yang bernilai ekonomis sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Hasilnya produk dikelola oleh wadah organisasi khusus yang secara spesifik mengelola mengelola ini. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terciptanya manfaat ekonomi dari aktivitas ODK. Organisasi di Kabupaten Blitar yang saat ini menjalankan fungsi tersebut adalah Harapan Mulia di Desa Resapombo, Kecamatan Doko dengan produknya berupa Batik Ciprat.
3. Peningkatan pelatihan kepada pengurus panti agar memiliki keterampilan yang lebih profesional mengelola panti dan mampu terakreditasi. Bantuan permakanan dan uang saku juga diberikan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak dan lansia penghuni panti sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya lebih baik.

4. Sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang berhak mendapatkan bantuan, terhadap tenaga operator dari 248 desa/kelurahan dan memantau proses verifikasi dan validasi data oleh petugas di desa. Sosialisasi ke kepala desa/kelurahan ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemutakhiran basis data keluarga fakir miskin, serta peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi petugas-petugas lapangan yang mengalami kesulitan dalam proses input data di lapangan.
5. Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam rangka percepatan pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat.
6. Sosialisasi tentang ketentuan UMK serta sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan.
8. Fasilitasi rekrutmen dan seleksi karyawan melalui aplikasi e-jobfair untuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Blitar dan beberapa perusahaan di Batam.
9. Pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair) dengan mengundang perusahaan dari wilayah Blitar Raya maupun dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 pameran bursa kerja (job fair) dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan kepesertaan Perusahaan mencapai 135 perusahaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pencari kerja bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan pencari kerja/penganggur dapat terserap lebih maksimal.
10. Inovasi berupa Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA). Melalui peningkatan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA) ini diharapkan :
  - a) memudahkan para pencari kerja untuk mengakses informasi yang valid tentang jumlah lowongan kerja baik itu lokal blitar, luar daerah, dan luar negeri; dan
  - b) masyarakat / angkatan kerja mengetahui berbagai program kegiatan pelatihan baik itu pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

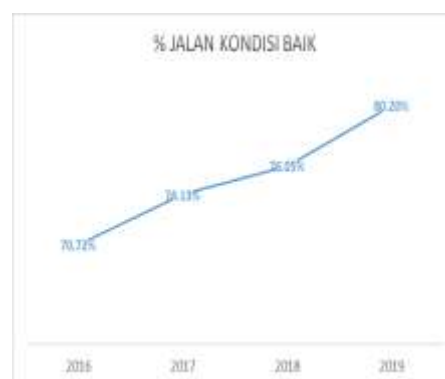
11. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lokasi (sasaran) penempatan transmigrasi, serta kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

**Sasaran : Meningkatkan Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Strategis 2**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	79,94	81,92	80,01	97,6%	0,07
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>97,6%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis yaitu Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur tercapai 97,6% atau Kategori **Berhasil**. Indikator ini disusun dengan 4 sub indikator yang terdiri dari Persentase Jalan Kondisi Mantap dan Jumlah Saluran Irigasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub indikator Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum dan Rumah Tangga Bersanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja setiap sub indikator menunjukkan tren kenaikan setiap tahun dan keberhasilan capaian target kinerja pada dinas pendukungnya.

Perkembangan jalan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Sesuai SK Bupati Blitar no 188/351/409.012/KPTS/2011, panjang jalan daerah kabupaten adalah 1.383 km. Jika tahun 2016 jalan kondisi mantap sepanjang 977,92 km



atau 70,72%, meningkat drastis menjadi 1.109,47 km atau sebesar 80,20% pada tahun 2019. Target kinerja sub indikator Jalan Kondisi Mantap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tercapai sebesar 105,46% atau Sangat Berhasil dari target kinerja 1.052 km terealisasi sepanjang 1.109,47 km.

Capaian kinerja cakupan (luas) Kabupaten Blitar dalam kondisi baik (Ha) sampai tahun 2019 juga menunjukkan tren peningkatan luasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015, luas Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Blitar adalah 28.012 Ha. Tahun 2016 luas saluran irigasi kondisi baik adalah 24.091,18 Ha atau 86% dan terus meningkat sampai akhir tahun 2019 seluas 24.420,13 Ha atau 87,18%.

Jumlah penduduk yang memiliki akses Air Minum dan Air Bersih juga terus meningkat pada 4 tahun terakhir sebagai wujud komitmen atas hak-hak dasar layanan masyarakat. Jika tahun 2016 baru sebanyak 850.785 orang atau 74% dari jumlah penduduk, maka tahun 2019 telah menjadi 945.023 orang atau 81,42%, atau naik rata-rata



3,24% setiap tahun. Sedangkan, untuk indikator Persentase Rumah Tangga bersanitasi, tahun 2016 sebanyak 242.438 rumah, maka pada tahun 2019 telah naik menjadi 246.417 rumah tangga.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program, Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	126.611.866.146	112.271.163.789	88,67
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	25.005.578.011	11.671.466.917	56,55
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.573.342.315	19.633.963.769	83,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	24.269.800.000	22.890.445.490	94,32
Program Pembangunan dan rehabilitasi Gedung dan prasarana Pemerintahan	43.951.925.000	19.907.237.478	45,29
Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.815.100.000	1.408.778.058	77,61
Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur (DBHCHT)	2.000.000.000	1.818.594.500	90,93
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>247.227.611.472</b>	<b>192.071.837.581</b>	<b>77,90</b>

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Perumahan	1.037.739.500	965.044.410	92,9
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	27.301.252.100	25.753.723.105	94,3
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	12.820.787.000	12.393.397.798	96,6
Program Fasilitasi Bidang Pertanahan	10.904.410.000	10.658.757.985	97,75
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>52.064.188.600</b>	<b>49.770.923.298</b>	<b>95,60</b>

c. Dinas Kesehatan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Kesehatan Lingkungan	3.871.899.000	3.529.096.809	91,15
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.871.899.000</b>	<b>3.529.096.809</b>	<b>91,15</b>

d. Dinas Perhubungan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.685.000	3.684.600	10,33
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	565.710.000	449.120.056,46	79,39
Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	2.200.564.807	2.181.913.757	99,15
Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi	2.314.724.640	2.233.487.060	96,49
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>5.143.684.447</b>	<b>4.895.205.473</b>	<b>95,17</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (overloading) pada ruas jalan.
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada.
3. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan.
4. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan.

5. Perlunya optimalisasi anggaran pembangunan bidang sumber daya air dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran.
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan.
7. Permasalahan dalam hal ketersediaan air, efisiensi air irigasi dan pengoperasian irigasi yang teratur.
8. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
9. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Belum optimalnya proses penyatuan data mengenai pembangunan infrastruktur Permukiman Rakyat
11. Belum optimalnya proses penyatuan data mengenai backlog perumahan.
12. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan anggaran dan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13. Kurangnya data geospasial mengenai pertanahan.
14. Fasilitasi permasalahan tanah dalam hal ini fasilitasi ganti rugi lahan berdampak normalisasi Kali Bogel memerlukan koordinasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak.
15. Kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat, terutama untuk menanggulangi penyakit tidak menular, masih rendah.
16. Masih kurangnya SDM perhubungan yang sesuai dengan kompetensinya, seperti belum adanya SDM yang memiliki kompetensi Andalalin, manajemen terminal dan PPNS perhubungan. Misalnya, jumlah penguji dimiliki masih sangat kurang, dimana dari 15 alat uji dioperasikan oleh 4 orang penguji dari ASN dan 1 orang penguji dari tenaga non teknis.
17. Kesadaran masyarakat pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala maupun mengurus ijin trayek, masih rendah.
18. Belum adanya regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan angkutan, berpotensi terjadinya permasalahan. Contoh adalah munculnya angkutan umum berbasis online yang saat ini telah berkembang pesat di Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis adalah:

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai International Roughness Index (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan).
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
3. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan.
4. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air.
6. Penerapan *reward and punishment* bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Melakukan penyusunan database perumahan dan pembangunan infrastruktur permukiman rakyat.
8. Melakukan penyusunan kajian pengembangan perumahan dan kajian pengembangan kawasan permukiman.
9. Melakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait.
10. Melakukan penyusunan database pertanahan.
11. Sosialisasi untuk perilaku hidup bersih masyarakat melalui kerjasama dengan aparatur pemerintah desa dan organisasi masyarakat terkait.
12. Peningkatan kompetensi SDM bidang perhubungan dengan pengiriman pegawai dalam diklat peningkatan kapasitas SDM
13. Pelaksanaan sosialisasi pada pemilik angkutan akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan ijin trayek, serta operasi simpatik di jalan raya yang dilaksanakan bersama dengan kepolisian dan CPM untuk ketertiban berlalu lintas.



14. Pengusulan anggaran untuk perlengkapan keselamatan jalan melalui APBD, APBD Provinsi Jatim dan APBN.
15. Menjalin kerjasama melalui program CSR untuk pemenuhan sarana dan prasarana transportasi.
16. Mengusulkan regulasi kebijakan operasional angkutan berbasis online dan review atas regulasi kebijakan pemerintah daerah yang telah ada dan menginventarisir kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan regulasi kebijakan di tingkat daerah.

**Sasaran : Terwujudnya Stabilitas Wilayah**  
**Strategis 3**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	100%	100%	-
Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%	95%	100%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Stabilitas Wilayah mencapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja tersebut didukung oleh target kinerja Bakesbangpol dalam membina sebanyak 15 LSM dan ormas dari 172 ormas yang berijin terdaftar. Pembinaan dilakukan dengan tujuan agar Ormas dan LSM dapat lebih akuntabel, tetap dalam koridor Pancasila, dan untuk pengawasan kegiatan ormas dalam menjaga stabilitas daerah. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap partai politik, yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam bentuk kegiatan: Workshop Keuangan Lembaga Politik; Sosialisasi pendidikan politik calon Legislatif; Pembinaan administrasi parpol; dan Deklarasi Pemilu Damai 2019 dan 2020.

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui berbagai program prioritas yaitu mitigasi bencana, kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi. Mitigasi bencana dilakukan melalui pembentukan sekolah aman bencana di 3 sekolah, pembentukan desa tangguh bencana (destana) di 3 desa dan optimalisasi pengelolaan pusat pengendalian

operasional (pusdalops). Kedarutatan dan logistik dilakukan melalui peningkatan kecepatan respon penanggulangan bencana kurang dari 24 jam dan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di berbagai lokasi sebanyak 64 titik.

Terkait dengan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP telah mampu mencapai target kinerja pendukung yaitu pemenuhan rasio siskamling di setiap desa/kelurahan, pemenuhan jumlah linmas per 10.000 penduduk, optimalisasi cakupan patroli trantib, pemenuhan cakupan pelayanan bencana dan peningkatan waktu tanggap daerah layanan wilayah pemadam kebakaran (WMK). Optimalisasi pengaduan pelanggaran peraturan daerah dari masyarakat juga ditingkatkan melalui aplikasi online. Realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pencegahan dan Penanganan Konflik	1.864.500.000	1.853.100.000	99,39
Program pengembangan wawasan kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan	1.673.231.260	1.654.406.200	98.87
Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik	655.100.000	643.150.000	98.18
Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol	679.700.000	669.992.700	98.57
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>4.872.531.260</b>	<b>4.820.648.900</b>	<b>98,94</b>

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	432.100.000	394.621.137	91,33
Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat	447.125.000	434.844.500	97,25
Program Pemeliharaan Katrantibmas	667.700,000	658.924.069	98,69
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1.677.700.000	1.632.919.500	97,33
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	458.500.000	444.326.850	96,91
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.683.125.000</b>	<b>3.585.541.111</b>	<b>97,35</b>

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan	3.768.619.000	3.690.208.050	97,92
Program Kedaruratan dan Logistik	449.370.000	441.445.000	98,24
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3.026.805.000	2.977.285.500	98,36
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.683.125.000</b>	<b>3.585.541.111</b>	<b>97,35</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Tingkat kesadaran pemilih yang diwujudkan dalam partisipasi masyarakat dalam pemilu terutama bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula, masih cukup rendah.
2. Masih tingginya heterogenitas dan semangat primordialisme masyarakat sehingga rentan terjadi benturan.
3. Mulai berkembangnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga mulai menjadi tambahan potensi gangguan stabilitas sosial.
4. Jumlah personil Satpol PP yang masih kurang untuk menangani kompleksitas dan banyaknya permasalahan penegakan Perda di lapangan dan luasnya wilayah operasi. Jumlah personil Satpol PP saat ini hanya 93 personil dimana jumlah ini jauh di bawah ideal yaitu sebanyak 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
5. Sarana pendukung mobilitas operasi juga sangat kurang, dimana saat ini hanya mobil patroli 6 unit, kendaraan dinas mobil 3 (tiga) unit, motor 28 unit, dan mobil damkar hanya 2 unit.
6. Motivasi masyarakat menjadi kader Linmas yang masih rendah dan kaderisasi yang belum berjalan optimal.
7. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi acuan dan arah pembangunan Kabupaten Blitar yang berbasis Pengurangan Risiko Bencana, belum ada.
8. Standar operasional prosedur (SOP) yang lengkap dan komprehensif yang mampu mendukung kegiatan Penanggulangan Bencana, belum optimal pelaksanaannya.
9. Mulai munculnya fenomena anomali iklim, perubahan hidrometeorologis, yang terjadi menyebabkan perubahan peta rawan bencana di Kabupaten Blitar. Wilayah pesisir pantai meningkat skala potensi ancaman bencana baik bencana kekeringan yang berkepanjangan dan ancaman badai. Hal ini berakibat peta rencana penanganan bencana kekeringan berubah dan semakin luas.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Mengoptimalkan peran forum-forum (FKDM, KOMINDA, FKUB dan FPK) yang ada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan untuk mengantisipasi potensi timbulnya gejolak di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.
2. Meningkatkan kegiatan FKUB dan FPK ke arah pemberdayaan organisasi yang dapat mengubah perberdaan menjadi keunggulan kompetitif.
3. Melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. Mengefektifkan peran Tim Koordinasi dan Pokja P4GN di Kabupaten Blitar.
5. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi pemilu di 6 dapil, memberikan dukungan kelancaran logistik pemilu, serta monitoring KAMTIBAS di daerah.
6. Pengajuan tambahan jumlah SDM Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP, Instansi vertikal terkait (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer) dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
8. Meningkatkan intensitas pembinaan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sebagai bagian dari upaya pencegahan, misalnya pembinaan terhadap pelaku usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna, Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah bagi pelaku usaha di tempat (penambang pasir wilayah Kabupaten Blitar) dan usaha yang terindikasi mencemari lingkungan.
9. Pengajuan penambahan sarana prasarana (mobil damkar, mobil patroli);
10. Intensifikasi penyuluhan atau sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan perda, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras;
11. BPBD Kabupaten Blitar bersama perangkat daerah terkait telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tingkat Kabupaten tahun 2019.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun lebih komprehensif tahun 2019.
13. Penambahan anggaran Bantuan Tidak Terduga untuk penyaluran bantuan air bersih kepada penduduk terdampak kekeringan.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan**  
**Strategis 4**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	0,5879	0,62	0,5888	93,5%	0,09
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>93,5%</b>	

Capaian rata-rata sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan sebesar 93,5% atau Kategori **Berhasil**. Realisasi capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Indeks Pendidikan tahun 2015 adalah 0,5738 dan naik signifikan di tahun 2016 menjadi 0,5855 serta tahun berikutnya sampai 2019 tren nya tetap naik meskipun landai, pada tahun 2019 nilainya menjadi 0,5888. Berbagai program prioritas dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar. Dinas Pendidikan terus meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk SD/MI mencapai 95% dan SMP/MTs sebesar 98%, perluasan akses pendidikan untuk meningkatkan rasio sekolah dan anak usia sekolah yang sudah mencapai 1:153 anak, peningkatan kompetensi guru dengan minimal kualifikasi S1 yang sudah mencapai 95%, dan akses kepubstakaan melalui layanan perpustakaan keliling ke seluruh wilayah dengan 1 unit bus, 1 unit mobil dan 1 motor pintar, peningkatan literasi dan minat baca melalui berbagai lomba perpustakaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan kepada 80 orang perwakilan dari masing-masing lembaga perpustakaan desa/kelurahan maupun lembaga lainnya. Dalam bidang olah raga, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga, telah mendukung pencapaian prestasi olah raga siswa yang meraih Juara I Renang Putri dan Juara I Bulutangkis Tunggal Putra di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2019. Beberapa Inovasi pendidikan yang telah dilakukan antara lain Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIM PINTAR).



Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2.361.050.000	2.261.116.737	95,77
Program Pendidikan Sekolah Dasar	80.676.468.203	80.676.468.203	100
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48.545.691.786	47.506.932.892	99,40
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	646.650.000	616.113.343	95,28
Program Peningkatan Ketersediaan , Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.007.381.000	9.734.540.924	99,40
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>143.237.240.989</b>	<b>140.795.172.099</b>	<b>98,30</b>

b. Dinas Perpustakaan dan Arsip

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	790.776.000	717.273.925	90,71
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>790.776.000</b>	<b>717.273.925</b>	<b>90,71</b>

c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga	3.307.400.000	3.213.293.500	97,15
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.307.400.000</b>	<b>3.213.293.500</b>	<b>97,15</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan pendidikan, khususnya tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
2. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan khususnya guru tidak tetap, dan pemerataan penyebaran dan penataan tenaga guru masih belum optimal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

3. Belum maksimalnya pemenuhan pembiayaan operasional beberapa SD dan SMP, serta pemenuhan biaya tenaga guru dan biaya sarana prasarana.
4. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).
5. Perpustakaan belum memiliki tenaga fungsional pustakawan yang memiliki keahlian dan kompetensi mengelola perpustakaan, sehingga Perpustakaan umum daerah yang belum bisa diusulkan terakreditasi.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam mencapai sasaran strategis, antara lain:

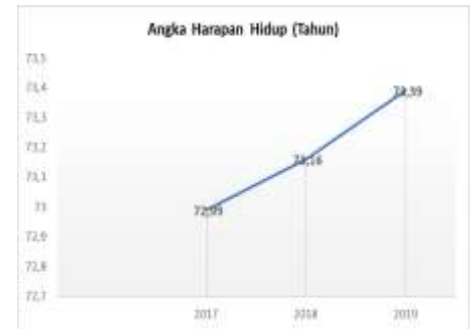
1. Pemberdayaan komite sekolah melalui fasilitasi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar.
2. Melaksanakan pemetaan guru per sekolah serta redistribusi guru sehingga kebutuhan guru sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memprioritaskan kebutuhan guru di daerah terpencil dengan memenuhi fasilitasi dan jaminan hidupnya.
3. Memanfaatkan BOS *Afirmasi* untuk menopang kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir dalam BOS reguler.
4. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
5. Mengusulkan formasi tenaga fungsional pustakawan dan perpustakaan daerah segera diusulkan akreditasi.

**Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan**  
**Strategis 5 Masyarakat**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	0,8178	0,8170	0,8214	100,5%	0,36
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100,5%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan mencapai 100,5% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sasaran strategis tersebut antara lain meningkatkan

luasan akses sarana kesehatan melalui pembangunan RSUD Srengat, kualitas pelayanan Rumah Sakit Rujukan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, pemenuhan rasio tenaga kesehatan dan penduduk yang terus membaik, peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil, melahirkan, dan balita melalui puskesmas dan pos yandu, program pencegahan penyakit melalui imunisasi, intensifikasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular, program penanganan atas kesehatan jiwa. Berbagai capaian kinerja urusan kesehatan antara lain angka kematian bayi per 1000 kelahiran hanya 7,2%, angka harapan hidup masyarakat terus meningkat menjadi 73,39 tahun, prevalensi gizi buruk menurun tinggal 0,033%, Rasio posyandu per satuan balita membaik menjadi 1:46 balita, Rasio dokter per satuan penduduk membaik menjadi 1:5.228, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat menjadi 28,88%.



Program pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera melalui peningkatan partisipasi aktif keluarga berencana juga sangat mendukung. Program prioritas yang dilakukan melalui proses pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran dan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja atas peserta KB aktif sebanyak 189.634 pasangan atau 122,13% dari target tahun 2019 dan jumlah UPPS juga terus meningkat di atas 208 buah pada tahun 2019.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pelayanan Kesehatan	211.861.696.997	192.294.696.797	90,76
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	20.513.133.316	14.902.555.331	72,65
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	31.637.572.000	28.744.936.050	90,86
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.560.452.000	2.256.471.166	88,13
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	148.000.000	119.267.500	80,59
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>266.720.854.313</b>	<b>238.317.926.844</b>	<b>89,35</b>



b. RSUD Ngudi Waluyo

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD	92.494.158.131	92.494.158.131	100
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	2.367.439.605	2.143.724.409	90,55
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Rujukan	11.743.840.000	11.144.875.834	94,89
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>106.605.437.736</b>	<b>105.782.758.375</b>	<b>99,23</b>

c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.603.581.830	7.224.552.528	95,02
Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender	369.965.000	368.323.300	99,56
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>7.973.546.830</b>	<b>7.592.875.828</b>	<b>95,23</b>

Dinas Kesehatan sangat agresif dalam melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Dinas kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo sampai tahun 2019 sudah menghasilkan inovasi tidak kurang dari 8 buah, yaitu (1) SI ANOMAN (Sistem Antrian Nomor Mandiri) yaitu aplikasi pendaftaran khusus pasien kunjungan ulang (*membership*) yang dapat diakses menggunakan mesin antrian mandiri untuk *check-in* pasien yang akan berobat ke poliklinik tanpa perlu antri di loket pendaftaran; (2) KOPI PETENG (Kode Pengingat TT Kosong) yaitu Aplikasi SIM RS secara online untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur kosong; (3) SIPERAGA (Sistem Informasi Petugas Jaga Rawat Inap) yaitu Metode untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang petugas jaga pada setiap shift; (4) ANTAR PASTI (Antri Sebentar Pasien Langsung Dilayani) yaitu pendaftaran pasien dengan menggunakan teknik rekam sidik jari pasien (*finger print*) langsung ke Instalasi Rehabilitasi Medik; (5) SI ELA (Sistem Informasi Elektronik Laboratorium) yaitu Aplikasi sistem informasi elektronik laboratorium yang mencakup pendaftaran pasien, permintaan jenis pemeriksaan, pencetakan label sampel, menampilkan hasil laboratorium link dengan komputer ditempat pelayanan pasien rawat inap, jalan dan IGD; (6) PIKACU (Pengendalian Infeksi Pada Masyarakat ICU) yaitu Pencegahan infeksi nosokomial dengan memasang alarm

pengingat cuci tangan di dekat pintu ruang perawatan; (7) BLITAR SERASI (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi terapi self healing, Rom dan musik di ruang Stroke Center) yaitu Terapi self healing; serta 2 inovasi dari Dinas PPKBP3A yaitu (9) Rel Panjang Aman (Relawan Perlindungan Anak Dari Jangkauan Kekerasan Preman) dan (10) Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahtera dengan Orientasi Surga).

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit baik melalui imunisasi dan pola hidup bersih masih kurang. Bahkan di beberapa desa, masih ada warga yang menolak imunisasi karena alasan keyakinan adanya kontra indikasi bahwa anak akan menderita penyakit auto imun, dll.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular karena faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan pekerjaan;
3. Belum semua desa memiliki Posbindu PTM dan Posbindu KIT, dan Belum adanya dukungan anggaran Desa untuk pengadaan BHP penunjang skrining PTM;
4. Masih adanya keterbatasan SDM kesehatan dalam pelayanan.
5. Masih banyaknya stigma buruk terhadap ODGJ baik dari keluarga dan masyarakat;
6. Tingkat pendidikan, pemahaman serta status sosial ekonomi keluarga penderita masih kurang, dengan menganggap obat dari Puskesmas kurang berkhasiat dan membeli obat sendiri di apotek serta memilih pengobatan alternatif, namun tidak dilakukan secara rutin dan terus menerus. Sedangkan penderita ODGJ rentan untuk kambuh kembali ketika tidak mengkonsumsi obat secara rutin;
7. Belum adanya Pengawas Minum Obat bagi ODGJ di wilayah kerja puskesmas.
8. Masih minimnya dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di IGD dan ICU sehingga berdampak pada masih tingginya angka kematian kasar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
3. Penguatan rujukan berjenjang dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengaktifkan PSC.
4. Perbaikan mutu pelayanan life saving di IGD dan melaksanakan pelatihan ACLS bagi seluruh tenaga medis agar memahami penanganan kegawatdaruratan pada jantung.

**Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	78,02	77,20	79,15	<b>102,53</b>	1,13
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>102,53</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak adalah sebesar 102,53% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Berbagai program/kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan terus dilakukan, antara lain dalam sektor ekonomi, dari total 229.695 angkatan kerja perempuan di tahun 2019, diperoleh partisipasi perempuan sebanyak 201.306 orang. Sedangkan, partisipasi dalam bidang politik dan kelembagaan juga terus dilakukan. Indeks Pemberdayaan Gender terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yaitu 77,15 poin tahun 2017 terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi sebesar 79,15 poin.



Terkait dengan perlindungan anak, program prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar bekerjasama dengan seluruh OPD melalui berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi kepada seluruh Desa/Kelurahan dan sekolah di Kabupaten Blitar. Tahun 2019 terdapat 5 Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan Pembentukan Desa Kelurahan Layak Anak. Kerjasama lintas sektor bidang pendidikan, seluruh sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan mulai PAUD hingga SMP, 29 SMA/SMK Negeri dan Swasta dibawah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta 145 Madrasah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah berkomitmen untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Hasilnya, tahun 2019, Kabupaten Blitar kembali berhasil mempertahankan predikat “**Kabupaten Layak Anak Dengan Kategori Madya**”.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	801.324.400	707.284.319	88,26
Program Peningkatan Kelembagaan Perempuandan Anak	968.635.750	834.406.248	86,14
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>7.973.546.830</b>	<b>7.592.875.828</b>	<b>95,23</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Masih minimnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbasis dan memiliki *concern* pada Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Masih rendahnya kesadaran laki-laki tentang kesetaraan gender, sehingga mendorong tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak anak.
5. Belum optimalnya kinerja kelembagaan gender dan anak.
6. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran strategis antara lain:

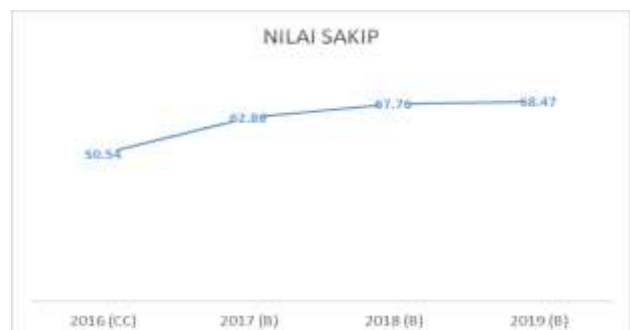
1. Membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat desa/kelurahan dalam penyelesaian kasus kekerasan.
2. Intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan sanksi jika terjadi kekerasan melalui upaya sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan apabila terjadi kasus kekerasan.
3. Intensifikasi penanganan kasus melalui fasilitas yang ada di P2TP2A seperti : Konsultasi psikologi, pendampingan hukum, konsultasi tokoh agama, pemanfaatan rumah aman bagi korban yang membutuhkan dan rehabilitasi mental di pondok pesantren yang telah bekerjasama dengan P2TP2A.
4. Pengembangan jejaring atau kerja sama di tingkat desa / kelurahan melalui tenaga sukarelawan/Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melalui POS BANTU PPA untuk menerima pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak serta menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dengan Tiga Pilar (Kepala Desa/Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas) dan pendampingan saat korban dalam proses penyelesaian kasusnya apabila kasus dirujuk ke P2TP2A.

5. Pemenuhan hak anak bukan hanya tugas dari pemerintah tetapi juga merupakan tugas bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu Dinas PPKBP3A sebagai lead sector dan fasilitator akan berusaha lebih intensif berkoordinasi dengan semua elemen, agar ke depan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujud KLA pada tatanan yang lebih tinggi lagi.
6. Mengoptimalkan kinerja kelembagaan gender dan anak disebabkan oleh masih adanya egosentris dimasing – masing kelembagaan gender dan anak yang ada. Dinas PPKBP3A terus berupaya untuk meminimalisir permasalahan diatas dengan melaksanakan sosialisasi.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan PUG, disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsepsi PUG. Untuk itu di tahun ini Dinas PPKBP3A telah melaksanakan sosialisasi, workshop dan Bimtek tentang PUG dengan sasaran organisasi perempuan seperti P2WKSS, GOW, PKK dan lain-lain serta organisasi remaja.

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	B	B	B	100%	-
Nilai LPPD	n/a	30,530	31,238	102,32%	-
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100,77%</b>	

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah 100,77% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Sasaran strategis ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja nilai SAKIP menunjukkan kenaikan yang baik selama 4 (empat) tahun terakhir, Tahun 2016 nilai SAKIP sebesar 50,54 atau peringkat CC dan akhir tahun 2019 menjadi 68,47 poin atau nilai B. Berbagai kebijakan peningkatan nilai SAKIP terus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan perencanaan dan efektifitas pemilihan program dan



kegiatan (*refocusing*) yang benar-benar mendukung kinerja sasaran strategis. Selain itu, berbagai kegiatan dan dokumen pendukung untuk meningkatkan kualitas SAKIP terus dilakukan diantaranya menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, melakukan review SOP, menyusun Proses Bisnis Internal pemerintahan.

Peningkatan kualitas SAKIP juga dilakukan Inspektorat melalui Evaluasi SAKIP pada 52 OPD tahun 2019 dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan valuasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Tujuannya untuk mengukur *progress* tingkat implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas OPD dan memberi saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja OPD. Fokus evaluasi adalah evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, output, hasil dan manfaat (*outcome*). OPD yang telah dilakukan evaluasi pada tahun sebelumnya, pelaporan hasil evaluasi menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dan diketahui perbaikan dilakukan.

Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pada Bagian Sekretariat Daerah program yang mendukung SAKIP adalah Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Adapun detail realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagian Organisasi: Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan kinerja aparatur pemerintah daerah.	1.192.984.000	1.048.526.507	87,89
Bagian Pemerintahan: Program Fasilitas dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	1.848.245.500	1.762.828.868	95.38
Bagian Hukum: Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	313.950.000,00	298.525.135,00	95,09
Bagian Perekonomian: Program Fasilitas, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah	1.620.500.600	1.466.486.944	90,50
Bagian Perlengkapan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.320.355.000	14.194.503.689	86,97

Bagian Umum: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.131.150.000	1.078.086.156	95,31
Bagian Kesejahteraan Rakyat: Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.383.924.400	3.278.240.236	94,32
Bagian Layanan Pengadaan: Program pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	1.638.175.000,00	1.611.684.154,00	98,38
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>27.449.284.500</b>	<b>24.738.881.689</b>	<b>90,13</b>

b. Inspektorat

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.203.950.000	1.184.181.297	98,36
Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205.635.000	168.059.336	81,7
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	3.740.661.000	2.897.818.756	77,47
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>5.150.246.000</b>	<b>4.250.059.389</b>	<b>82,52</b>

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	167.690.400	157.969.710	94,20
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah	100.000.000	94.463.000	94,46
Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah	1.754.100.000	1.645.592.618	93,81
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	1.020.055.000	1.008.666.153	98,88
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	946.810.000	839.678.552	88,69
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	642.309.000	609.805.146	94,94
Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	452.995.000	430.555.698,50	95,05
Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah	526.995.000	518.093.242	98,31
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>5.150.246.000</b>	<b>4.250.059.389</b>	<b>82,52</b>

d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	3.142.279.000	3.095.700.575	98,52
Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.256.405.000	1.148.976.650	91,45
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	1.102.769.630	1.045.632.042	94,82
Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah	1.641.667.023	1.608.967.632	98,01
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>7.143.120.653</b>	<b>6.899.276.899</b>	<b>96,59</b>

Hambatan / Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Masih adanya perubahan tugas dan fungsi pada beberapa OPD yang belum dapat difinalisasi hingga akhir tahun dan akan diselesaikan pada tahun 2020.
2. Belum seluruh OPD memiliki dan menerapkan SOP yang mendukung kinerja sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi intensifikasi pembinaan perlu ditingkatkan.
3. Terkait penilaian SAKIP di tingkat Kabupaten, masih terdapat perangkat daerah yang mendapatkan predikat C, sehingga evaluasi dan pembinaan perlu ditingkatkan.
4. Beban kerja SDM aparatur yang menyusun dan melaporkan LKjIP yang tinggi dan masih banyak menangani semua administrasi di sekretariat.
5. Masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi.
6. Permasalahan yang dihadapi yaitu karya inovasi masyarakat yang dihasilkan melalui gelaran Lomba KRENOTEK dan INOTEK belum terpublikasi secara optimal sehingga belum banyak dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
7. Keterlambatan penetapan peraturan daerah Perda mengakibatkan mundurnya penetapan peraturan pelaksanaan dibawahnya.
8. Permasalahan terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan di tahun 2019 adalah perubahan peraturan dan kebijakan tentang pembangunan membuat sebagian besar kegiatan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Blitar mengalami penundaan. Efek penundaan adalah monitoring kegiatan juga mengalami penundaan hingga menjelang akhir tahun sehingga kurang maksimal dan beberapa pembangunan mengalami masalah dalam menyelesaikan pekerjaan fisiknya.



9. Pemahaman SOP namun beberapa perangkat daerah yang melibatkan tenaga protokol belum seluruhnya memahami SOP tersebut, sehingga koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau event belum seluruhnya dapat berjalan optimal.
10. Penyusunan Pengisian RUP masih belum bisa tepat waktu bisa terpublikasikan semua di awal tahun anggaran dan Masih ada kesalahan pengisian SIRUP baik metode maupun jadwal pelaksanaan yang hanya sekedar terisi.
11. Perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang cepat tidak direspon aktif oleh OPD yang bersangkutan.
12. Pemahaman strategi pelaksanaan tender masih lemah

Solusi yang ditempuh menghadapi permasalahan :

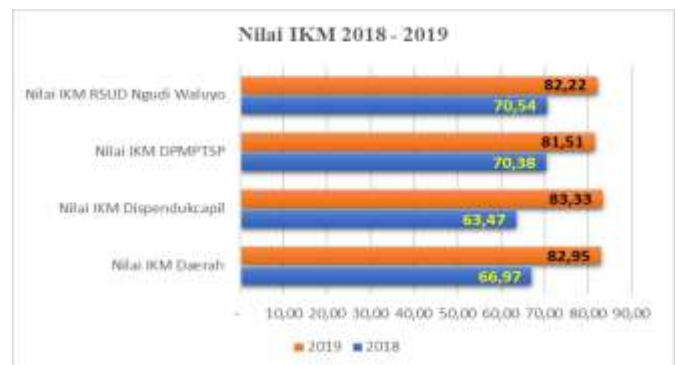
1. Peningkatan kapasitas Bimbingan Teknis dan Pendampingan penyusunan laporan kinerja aparatur dilakukan lebih intensif.
2. Mempercepat penyelesaian penyusunan peraturan bupati tentang beberapa tugas dan fungsi OPD sebagai dasar pelaksanaan kerja.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP dalam pelaksanaan SAKIP dan meminta OPD melakukan review jika belum optimal.
4. Mengusulkan penambahan personil ke BKPSDM atau mengganti personil yang lebih kompeten dan sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan terutama pada jabatan pelaksana.
5. Pelaksanaan koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi akan diintensifkan mulai Tahun 2020
6. mengikutsertakan karya-karya inovasi dalam berbagai ajang pameran baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun diseminasi yang lebih intensif perlu ditingkatkan, misalnya melalui media massa (televisi, radio, dan media cetak) maupun perumusan tindak lanjut pengembangan karya inovasi oleh OPD terkait. Selain itu, tingkat kepesertaan Krenotek masih dapat ditingkatkan melalui perpanjangan tahapan sosialisasi yaitu pada tahun 2020 akan dimulai sejak Februari sehingga semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gelaran tersebut.
7. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang diharapkan, koordinasi aktif dari perangkat daerah selaku penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu yang mencukupi sehingga persiapan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

8. Mengintegrasikan perencanaan dengan SIRUP, sehingga tidak perlu mengisi SIRUP Nasional secara manual dan Melakukan pendampingan SIRUP
9. Memberikan pemahaman terkait strategi pengadaan kepada OPD sehingga proses tender/seleksi dapat dilakukan di awal tahun
10. Mengusulkan pengadaan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, baik itu melalui pengangkatan.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
**Strategis 8**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik	100%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis atas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik mencapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan daerah setiap tahun. Tahun 2018 SKM dilakukan terhadap 3 perangkat daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan RSUD Ngudi Waluyo. Hasil nilai IKM sebesar 66,97 poin atau kategori Kurang Baik. Berbagai rekomendasi kebijakan diberikan kepada



OPD sasaran dan tahun 2019 kembali dilakukan SKM pada 4 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Hasil SKM tahun 2019 berhasil diperoleh nilai IKM sebesar 82,95 atau Kategori Baik. Survei tahun 2019 digunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup 9 unsur penilaian, sebagai pengganti Nomor 16 Tahun 2014.

Beberapa capaian kinerja pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya persentase masyarakat pada kepemilikan dokumen kependudukan, yaitu persentase kepemilikan KTP dan Akte Kelahiran. Tahun 2015 % penduduk memiliki KTP hanya 81,10% dan terus meningkat tren nya secara gradual sampai tahun 2019 sudah



tercatat sebanyak 96,76% atau naik rata-rata sebesar 3,73% per tahun. Capaian kinerja atas indikator sebesar 112,85% dari target 85,74% mampu direalisasi sebesar 96,76%. Pada indikator % penduduk memiliki Akte Kelahiran tahun 2015 hanya 80,93% dan terus meningkat tren nya secara gradual sampai tahun 2019 sudah tercatat sebanyak 88,75% atau naik rata-rata sebesar 1,87% per tahun. Capaian kinerja atas indikator sebesar 102,84% dari target 86,30% mampu direalisasi sebesar 88,75%. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat atas pentingnya dokumen ini. Berbagai indikator kinerja pelayanan di perangkat daerah juga terus mengalami perbaikan secara gradual setiap tahun.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika,. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	178.759.000	176.031.500	98,47
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	214.430.000	207.280.700	96,67
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	192.495.000	190.561.650	93,76
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.610.085.400	2.537.312.248	97,21
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	4.352.389.600	4.117.348.773	94,60
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>7.369.400.000</b>	<b>7.052.503.371</b>	<b>95,70</b>

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai	1.429.309.000	1.392.771.710	97,44
Pengadaan dan Pembinaan Aparatur	1.892.212.500	1.109.222.984	58,62
Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian	1.610.756.000	1.391.972.248	86,42
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	6.893.560.000	6.532.329.448	94,76
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>11.825.837.500</b>	<b>10.426.296.390</b>	<b>88,17</b>

c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	278.300.000	275.770.167	99,09
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	293.750.000	271.252.932	92,34
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>572.050.000</b>	<b>547.023.099</b>	<b>95,63</b>

d. Dinas Pendidikan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	646.650.000	616.113.343	95,28
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>646.650.000</b>	<b>616.113.343</b>	<b>95,28</b>

e. Sekretariat DPRD

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.996.231.150	1.492.185.285	74,75
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi	7.649.546.000	6.811.138.345	89,04
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan	9.493.283.285	8.724.998.235	92,11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran	3.737.905.000	3.512.807.425	94,23
Program Penguatan Kelembagaan	11.550.850.250	10.384.310.569	89,90
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>24.782.038.535</b>	<b>22.622.116.344</b>	<b>91,28</b>

f. Dinas Kesehatan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pelayanan Kesehatan	211.861.696.997	192.294.696.797	90,76
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>211.861.696.997</b>	<b>192.294.696.797</b>	<b>90,76</b>

g. RSUD Ngudi Waluyo

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD	92.494.158.131	92.494.158.131	100
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>92.494.158.131</b>	<b>92.494.158.131</b>	<b>100</b>

h. Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.285.577.400	3.213.211.070	97,80
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK	5.517.443.400	5.466.719.603	99,08
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>92.494.158.131</b>	<b>92.494.158.131</b>	<b>100</b>

i. Badan Pendapatan Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	4.419.080.000	4.160.441.850	94,15
Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi	1.741.650.000	1.726.765.546	99,15
Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	579.400.000	576.038.853	99,42
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>6.740.130.000</b>	<b>6.463.246.249</b>	<b>95,89</b>

Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah yang dibangun, dari target 14 aplikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar mampu merealisasi sebanyak 25 aplikasi dimana beberapa diantaranya sudah mendukung program *smart governance*. Aplikasi tersebut antara lain : Apeldeskel (Aplikasi Pelayanan Publik Desa/Kelurahan), E-Siap Oline (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Adminduk Online), I-Mobil (Ijin Mudah Online Bisa Paket Interaktif Langsung Jadi), Cek KTP, One Data, Siskeudes dan lain-lain.

Hambatan/Kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih diterapkan pada beberapa OPD pelayanan, yaitu sebanyak 4 OPD.
2. Cakupan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam pelayanan masih sangat kurang, beban kerja pegawai sangat tinggi dan akibatnya pelayanan tidak maksimal.
3. Sarana dan prasarana pelayanan di Dispendukcapil masih sangat kurang. Jumlah pelayanan rata-rata perhari mencapai  $\pm 500$  orang, kondisi ruang yang ada sangat kurang memadai. Ruang minimal loket penerimaan dan pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi, meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan tempat antrian. Tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang administrasi perkantoran. Fasilitas lainnya, ruang pertemuan, ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok.
4. Penyimpanan dan pengelolaan arsip dan dokumen kependudukan masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki resiko kerusakan, bencana alam dan kebakaran.
5. BKPSDM masih belum memiliki ketersediaan data kepegawaian mutakhir yang dapat cepat disajikan dan diakses. Akibatnya data kepegawaian belum dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pengembangan pola karier dan jabatan PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Belum adanya peta tentang kebutuhan kompetensi dan strategi pengembangan kompetensi ASN sehingga belum dapat ditentukan peta kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan oleh ASN.
7. Ketergantungan daerah terhadap Lembaga Penyelenggara Diklat baik Tingkat Provinsi maupun Instansi Pembina (Kementerian) masih sangat tinggi, sehingga tidak bisa mandiri dalam menyelenggarakan/mengirim peserta Diklat.
8. Masih beragamnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan sekolah dalam implementasi kebijakan pusat seperti PPDB Zonasi, UNBK, Perijinan kelembagaan melalui sistem elektronik atau Online Single Submission (OSS).
9. Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dan kompeten di bidang teknologi informasi masih sangat kurang.
10. Masih belum stabilnya pasokan internet ke OPD sehingga masih diterima beberapa keluhan mengenai internet.
11. Kurangnya pemahaman masyarakat (Wajib Pajak ) terkait regulasi Pajak Daerah di Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah diambil dalam pencapaian sasaran kinerja adalah:

1. Dilakukan usul penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya dibutuhkan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezzeting atau pemetaan kebutuhan aparatur, saat ini masih kurann 25 personil.
2. Gudang arsip telah diusulkan pembangunnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Selain ketersediaan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman. Manajemen arsip digital sangat penting dalam pengelolaan arsip kependudukan, sebab selain untuk menjaga keberlangsungan pengendalian kependudukan, juga agar mudah dalam penggunaan untuk tujuan pengawasan dan pengendalian data migrasi penduduk.
4. melakukan proses penyempurnaan dan pemutakhiran data kepegawaian pada SIMPEG agar dapat disajikan dengan cepat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan untuk pola pengembangan dan penataan karier PNS serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Dengan menyusun standar kompetensi sesuai dengan analisa jabatan sehingga identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi bagi ASN sesuai peran dari BKPSDM sebagai Unit Kerja yang bertugas mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan kompetensi ASN.
6. Pemerintah Daerah melalui BKPSDM lebih intensif melakukan koordinasi baik ke Lembaga Penyelenggara Diklat Kementerian, Provinsi Jatim maupun Provinsi lain agar penyelenggaraan maupun pengiriman peserta diklat Pemerintah Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan lancar dan anggaran dapat terealisasi dengan maksimal
7. Sosialisasi secara intensif baik langsung maupun kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelompok masyarakat.
8. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan terhadap masyarakat.
9. Sosialisasi dan pendampingan ke lembaga terkait implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi dan perijinan sekolah.
10. Pada tahun 2019, Dinas Kominfo telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan merekrut dua orang tenaga programmer dan satu orang desner grafis untuk mendukung kinerja publikasi dan membuat aplikasi-aplikasi sederhana guna mempermudah dan mendukung kinerja OPD. Selanjutnya secara umum Dinas

Kominfo akan terus melaksanakan peningkatan kapasitas dan Sumberdaya Aparatur melalui berbagai diklat, bimbingan teknis, maupun kegiatan lain yang berpotensi menambah kemampuan sumberdaya aparatur OPD.

11. Ke depan akan dilakukan backup jaringan maupun assesment jaringan ke OPD-OPD untuk evaluasi permasalahan dan rekomendasi penyelesaian sehingga gangguan internet dapat diminimalisir.

12. Mengadakan sosialisasi kepada pengusaha, aparat pemerintahan dan masyarakat mencakup seluruh kecamatan, serta monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Beberapa perangkat daerah pelayanan publik secara intensif melakukan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 10 jenis inovasi dalam pelayanan kependudukan, antara lain:

1) E-SIAP; adalah tonggak menuju “Dispenduk Go Digital”, yaitu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* melalui *website* dan aplikasi; 2) ATM;

Anjungan Tutul Mandiri (ATM) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online dimana pemohon secara mandiri melakukan pengajuan pelayanan melalui mesin anjungan yang tersedia; 3) AL ASAR; Akta Kelahiran



terbit sebelum Sepasar (AL ASAR), yaitu pelayanan akta kelahiran baik melalui bidan desa ataupun aplikasi E-SIAP dimana akta kelahiran diterbitkan paling lambat 7 hari setelah lahir; 4) AKAM; Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman (AKAM) merupakan pelayanan penerbitan akta kematian secara cepat dimana PRD mengirimkan berkas persyaratan melalui aplikasi *WhatsApp*; 5) KAWIN TERBAIK; Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar (KAWIN TERBAIK), pelayanan akta perkawinan yang Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4) untuk selanjutnya diterbitkan akta perkawinan yang diserahkan setelah pelaksanaan Ikrar Pernikahan; 6) Pelayanan Adminduk di Kecamatan; Pelayanan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilayani di kecamatan, salah satunya Cetak Kartu Keluarga; 7) Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan (PRD); Pembentukan petugas registrasi yang berfungsi sebagai verifikator awal pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan, pembagian nomor antrian pelayanan dan memonitor perkembangan berbagai peristiwa



kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan; 8) Tempat Layanan Adminduk (TLA ); Tempat Layanan Adminduk terbagi menjadi dua yaitu wilayah Barat (Kecamatan Srengat) dan wilayah Timur (Kecamatan Wlingi); dan 10) Pelayanan Keliling; Pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan Jemput Bola (JEBOL) dilaksanakan dengan mendatangi lokasi-lokasi ditetapkan kantor desa, sekolah, lembaga pemasyarakatan, sehingga diharapkan mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan; dan 11) Monitor Display Data Kependudukan

Dinas Komunikasi dan Informatika juga agresif melakukan inovasi pelayanan sampai tahun 2019, Kabupaten Blitar berhasil meraih penghargaan sebagai **Badan Publik Menuju Inovatif** dalam **PPID Award Tingkat Provinsi Jawa Timur**. Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 *smart city* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Smart city* merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Dengan mengambil visi cepat, nyaman, dan sejahtera, Kabupaten Blitar telah menyepakati dilaksanakannya 3 *Quick Win* di dalam reformasi birokrasi tahun 2019 yaitu : *E-Health*, *E- Economy* (Gerakan 999 UMKM Go-Online) dan *E- Environtment* (aplikasi Bunga Menanam) sebagai bagian dari *master plan smart city*.

**Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM**  
**Strategis 9 Berbasis Pertanian dan Pariwisata**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	7,16	6,63	6,29	94,87%	-0,87
Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,96	6,63	7,78	117,35%	0,82
Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	1,15	3,05	1,62	53,11%	0,47
Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (Rp.000)	4.223.855	3.486.499	5.742.647	164,7%	1.518.792
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>107,51%</b>	

Capaian rata-rata kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata adalah 107,51% atau Kategori **Sangat Berhasil** jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) buah.

Pertumbuhan PDRB ketiga sektor menunjukkan kenaikan yang moderat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Jumlah PDRB sektor pertanian masih cukup tinggi di dari 3 sektor lainnya, yang membuktikan bahwa perekonomian Kabupaten Blitar masih ditopang oleh Sektor Agraris (Pertanian). Tahun 2015 PDRB sektor pertanian sebesar Rp.6.810,85 milyar dan terus meningkat setiap tahun hingga tahun 2019 menjadi Rp.7.371,06 milyar, yang tumbuh rata-rata 2% selama 5 tahun meskipun persentase pertumbuhannya terus menurun.

Berbeda dengan sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan terus tumbuh meningkat baik nilai maupun prosentase nya. Tahun 2015 nilai PDRB sektor industri pengolahan masih Rp.2.767,88 milyar terus merangkak naik rata-rata 6,89% setiap tahun sampai tahun 2019 nilai PDRB sebesar Rp.3.612,44 milyar. Capaian



kinerja atas industri pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, dari target 20.250 (2,07%) industri terealisasi 20.282 (2,30%) industri. Demikian juga terhadap cakupan bina kelompok pengrajin sebanyak 2.670 kelompok.

Sektor Perdagangan juga tidak kalah dengan Sektor Industri Pengolahan, dimana tahun 2015 sebesar Rp.3.757,05 milyar dan terus tumbuh meningkat rata-rata 6,65% pertahun sampai tahun 2019 mencapai Rp.4.861,18 milyar. Sektor perdagangan didukung dengan angka pertumbuhan ekspor produk yang sangat



cepat. Jika pada tahun 2015 nilai ekspor masih berkisar Rp. 707,29 juta maka pada tahun 2019 telah mencapai Rp. 4,880 milyar, atau tumbuh rata-rata 66,28% pertahun. Dukungan investasi industri yang berorientasi ekspor sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Selain itu, kontribusi retribusi dari 13 pasar daerah sebesar Rp.4,125

milyar tahun 2019 atau melampaui target Rp.4,023 milyar atau tercapai 103,35%. Aktivitas pedagang pasar yang tinggi ini tidak lepas dari Komitmen Bupati Blitar pada tanggal 2 Oktober 2019 bertempat di Pasar Wlingi dengan *melaunching* “Kang Jimbang” atau Tukang Uji Timbangan oleh Bupati Blitar. Dengan Kang Jimbang, maka petugas penguji timbangan akan mulai bergerak aktif melakukan tugasnya ke berbagai lokasi di Kabupaten Blitar, di pasar, SPBU dan Wajib Tera Utang yang lain, sehingga Kang Jimbang Datang Masyarakat Tenang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan dukungan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif melalui pembentukan wirausaha muda. Pemerintah Kabupaten Blitar bekerja sama dengan USAID melaksanakan program USAID JAPRI (Jadi Pengusaha Muda). Sistem perekrutan peserta dilakukan secara *online*, dengan materi berupa BMW (*Bussiness Motivation Workshop*) BMC (*Bussiness Model Canvas*), ToT (*Training of Trainer*), ToC (*Training of Coach*), *Mentoring* dan *Coaching* kepada peserta untuk rentang waktu selama enam bulan. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dibuktikan sejumlah 300 orang mendaftar, dan setelah melalui berbagai tahapan seleksi terpilih 40 orang WUB (Wira Usaha Baru). Juga diluncurkan program ABANGWIRA (Audisi Pengembangan Wirausaha) yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (2019-2020) yang menyasar wirausaha muda yang telah merintis usaha dengan tujuan untuk menaikkan *omzet*. Dari tahapan audisi, dari 300 orang pendaftar terseleksi sejumlah 50 orang. Program kegiatan tersebut mampu mendukung capaian kinerja berupa jumlah Usaha Mikro (unit) yang mencapai 255.206 unit dan melampaui target sebanyak 254.287 unit atau 100,36%.

Sektor pertanian tanaman pangan padi sawah terus mengalami penurunan hasil produksi yaitu dari target 340.749 ton hanya mampu direalisasikan 294.454 ton atau 86,41%. Demikian juga untuk padi ladang hanya mampu diproduksi 25.929 ton atau 64,91% dari target 39.940 ton. Sedangkan, untuk tingkat produktivitas masih tercapai target yaitu 68 kuintal/ha yang melebihi target sebesar 66,5 kuintal/ha. Terjadi pergeseran tren perubahan komoditas tanaman, dimana jenis produksi tanaman padi terus menurun selama 3 tahun terakhir berganti menjadi tanaman jagung dan



umbi-umbian yang terus meningkat yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi tahun 2017 sebanyak 423.485 ton terus menurun menjadi 320.383 ton tahun 2019. Sebaliknya, hasil tanaman jagung tahun 2017 sebanyak 320.544 ton naik menjadi 391 ton tahun 2019. Demikian juga naman kedelai dari 9.055 ton tahun 2015 naik signifikan menjadi 14.959 ton tahun 2019, dan bahkan untuk uji kayu dari 76.157 ton naik drastis menjadi 121.902 ton tahun 2019 atau naik 1,6 kali lipat. Ubi jalar meningkat tajam dari 3.486 ton tahun 2015 menjadi 81.140 ton pada tahun 2019 atau naik 23 kali lipat dalam 3 tahun terakhir.

Peningkatan Produksi, Mutu, dan keamanan Tanaman Pangan maka dilakukan kebijakan Sertifikasi Varietas Padi PIM-1. Selain itu, sertifikasi mutu produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui Sertifikasi Organik Sayur Mayur, Sertifikasi Varietas Cabe Rawit Loblita I dan Loblita II, Sertifikasi Varietas Langsep Gaprang, dan Sertifikasi Organik Kakao. Beberapa jenis hortikultura yang meningkat signifikan antara lain bawang merah, kentang, kubis, kembang kol, kacang panjang, cabet rawit dan hasil produksi jamur. Untuk tanaman buah-buahan, beberapa hasil produk pertanian Kabupaten Blitar telah dikenal luas ke wilayah di Jawa Timur, diantaranya rambutan, belimbing, durian, alpukat. Berikut ini disajikan produksi tanaman sayur dan buah semusim di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019. Tanaman buah yang meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir adalah pisang, blimbing, durian, dan alpukat.

Sektor pertanian didukung berbagai program penguatan kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat. Program prioritas yang dilakukan antara lain pengembangan desa mandiri pangan, penguatan kelembagaan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, usaha pangan masyarakat, pemantapan pola konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan masyarakat. Penguatan Ketersediaan Pangan basis Umbi-Umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 6 desa sasaran. Konsep kegiatan adalah dengan pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pengembangan aneka sayuran, umbi, rempah dan obat untuk meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan pendapatan dan gizi keluarga di tingkat rumah tangga, sehingga rasio ketersediaan pangan dan terpenuhi kebutuhan Energi dan Protein meningkatkan Skor PPH di tahun mendatang.

Sub sektor Peternakan juga mengalami perubahan dan peningkatan populasi dan produksi hasil ternak. Populasi ternak masih tetap didominasi oleh jumlah sapi potong dan kambing masing-masing tahun 2019 mencapai 151.164 ekor dan 154.200 ekor. Angka

pertumbuhan sapi potong, sapi perah, kambing dan babi terus meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Populasi sapi perah mengalami kenaikan 8 persen dari 15.780 ekor (di tahun 2018) menjadi 16.973 (tahun 2019) karena adanya peningkatan investasi PT. Greenfield. Sedangkan, untuk populasi unggas, masih tetap didominasi oleh 4 jenis unggas di mana sampai tahun 2019 adalah ayam ras petelor sebanyak 17.076.200 ekor, ayam bukan ras sebanyak 2.675.400 ekor, ayam ras pedaging 4.022.800 ekor, dan itik sebanyak 1.476.000. Tren kenaikan populasi unggas tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah itik dengan rata-rata 14,07%, disusun ayam ras petelor sebesar 3,40%, kemudian ayam ras pedaging sebanyak 1,03% dan terakhir adalah ayam bukan ras yang meningkat hanya 0,76% pertahun.

Pada sub sektor perikanan tahun 2019 terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap menjadi 6.393,7 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 3.768,8 ton, dan produksi ikan budidaya pada tahun 2019 sebesar 18.697,04 ton. Kabupaten Blitar telah menjadi langganan pada kejuaran ikan hias Koi. Beberapa prestasi antara lain 7th All Indonesia Young Local Koi Show (Pasuruan), 1st Tuban Koi Show, 1st Malang Young Koi Show, 1st Lombok Young Koi Show, 2nd Bengawan Solo Koi Show, 1st Banyuwangi Koi Show, 2nd Pasuruan Young Koi Show - Bupati Cup, 16th All Indonesia Koi Show (BSD Tangerang).

Data indikator Penerimaan Pajak Daerah dari Usaha Kepariwisata di Kabupaten Blitar juga menunjukkan pertumbuhan nilai dan prosentasenya. Pajak ini diperoleh dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang penyediaan sarana dan prasarana serta akomodasi bagi wisatawan. Jika tahun 2016 jumlah pajak sebesar Rp. 2,49 milyar, telah terjadi pertumbuhan sebesar rata-rata 32,15% pertahun hingga tahun 2019 telah mencapai nilai Rp. 5,74 milyar. Peningkatan pajak daerah ini sebagai dampak dari perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat di berbagai destinasi di Kabupaten Blitar. Tahun 2017 jumlah wisatawan sebanyak 1.727.953 kunjungan yang terus meningkat rata-rata 26,31% setiap tahun selama 3 tahun terakhir, sehingga akhir tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 2.754.998 kunjungan.

Beberapa Perangkat Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan IKM	949.659.500	798.304.987	84,06
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian (DAC)	500.000.000	485.019.200	97,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	81.057.200	81.057.200	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal	164.370.000	162.424.000	98,82
Program Pengelolaan Pasar Rakyat	14.431.443.450	11.790.475.349	81,70
Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD	411.927.000	346.974.642	84,23
Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan	1.007.273.220	995.113.315	98,79
Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen	1.715.127.000	1.445.774.008	84,30
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	100.000.000	88.175.200	88,18
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>19.360.857.370</b>	<b>16.193.317.901</b>	<b>83,64</b>

b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	233.225.000	218.055.000	93,50
Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi	805.458.000	780.209.000	96,87
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro	700.000.000	687.605.500	98,23
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi Dan Usaha Mikro	867.395.025	865.923.479	99,83
Program Pemberdayaan, Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.337.075.000	1.306.468.159	97,71
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>3.943.153.025</b>	<b>3.858.261.138</b>	<b>97,85</b>

c. Dinas Pertanian dan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.711.928.000	1.673.306.007	97,74
Program Peningkatan Mutu Produk Pangan	388.525.000	340.975.000	87,76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.904.947.000	2.662.539.861	91,66

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	181.731.981	173.369.300	95,40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	6.815.977.271	6.465.191.435	94,85
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	1.414.600.000	1.368.935.200	96,77
Program Pengembangan SDM Pertanian	6.299.455.000	6.204.771.025	98,50
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian	2.130.906.500	2.063.313.357	96,83
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan	898.370.000	698.580.190	77,76
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura	3.303.250.000	3.082.566.087	93,32
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan	2.060.260.000	1.999.329.944	97,04
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>28.109.950.752</b>	<b>26.732.877.406</b>	<b>95,10</b>

d. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.252.548.883	1.242.373.707	99,19
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.820.270.217	1.797.694.886	98,76
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	59.325.000	55.295.787	93,21
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan	500.000.000	499.879.668	99,98
Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan	478.805.000	471.180.900	98,41
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	759.075.000	752.479.783	99,13
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	1.289.908.000	1.250.162.147	96,92
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>6.159.932.100</b>	<b>6.069.066.878</b>	<b>98,52</b>

e. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata	6.159.436.023	5.514.864.753	89,54
Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.128.700.000	2.055.101.101	96,54

Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya	4.002.977.500	3.638.255.450	90,89
Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga	3.307.400.000	3.213.293.500	97,15
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>15.598.513.523</b>	<b>14.421.514.804</b>	<b>92,45</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih belum tersedia data sektoral IKM yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan pengembangan.
2. Unit Metrologi Legal Kabupaten Blitar belum memiliki database potensi WTU.
3. Database koperasi yang akurat sulit belum ada karena beberapa alamat sulit ditemukan dan terbatasnya tenaga pendata.
4. Masih minimnya kemampuan koperasi untuk bergerak di sektor riil.
5. Tingkat partisipasi sekolah dalam lomba perkoperasian masih rendah, terutama sekolah-sekolah yang berlokasi jauh dari pusat ibukota.
6. Proses gegenerasi pengurus koperasi masih lemah.
7. Masih belum memasyarakatnya pola panganekaragaman pangan di masyarakat Kabupaten Blitar yang tercermin dari skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100.
8. Terbatasnya ketersediaan air irigasi untuk mencukupi kebutuhan di seluruh lahan pertanian di sepanjang tahun dari sumber sumur dalam, sumur dangkal, jaringan irigasi tersier (JIT), DAM Parit, embung, dan lain-lain.
9. Kemampuan petani melakukan budidaya pertanian untuk menunjang peningkatan intensitas tanam dan kemampuan petani melakukan pengolahan secara sempurna lahan pada areal persawahan yang mempengaruhi kualitas tanah, masih sangat terbatas.
10. Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas (unggul) dan penyediaan pakan serta kualitas bahan pakan ternak masih rendah dan tidak stabil.
11. Ketergantungan bahan pakan/ obat- obatan pada impor negara lain, misalnya bungkil kedelai (BK) dan meat bone meal (MBM) dan antibiotika, sangat tinggi.
12. Tingginya ancaman penyakit hewan strategis, yaitu Antrax, ASF dan Flu Burung (AI)
13. Jumlah puskesmas, tenaga penyuluh dan sarana serta prasarana pencegahan penyakit hewan masih kurang.
14. Sistem pengelolaan usaha peternakan yang masih bersifat tradisional dan belum ramah lingkungan.



15. Kurangnya promosi ternak dan produk peternakan serta minimnya informasi harga komoditas peternakan akurat sehingga fluktuasi harga produk peternakan yang tinggi.
16. Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi pengolahan produk hasil peternakan.
17. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pengawasan/ monitoring pemotongan hewan qurban, misalnya alat bedah yang relatif sederhana (cutter), mekanisme pelaporan yang manual (by sms/wa) dan 1 (satu) orang petugas pemantau yang bertugas untuk 1 (satu) desa dengan waktu pemotongan yang serentak sulit untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem (sebelum pemotongan).
18. Masih adanya masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil.
19. Pola penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih berorientasi pada penangkapan harian sehingga daerah penangkapan hanya sekitar pantai, belum dapat menjangkau lokasi penangkapan yang lebih jauh.
20. Harga pakan pabrik masih relatif mahal, hal ini merupakan kendala besar dalam suatu siklus produksi perikanan, sehingga biaya produksi relatif tinggi.
21. Akses pembudidaya terhadap informasi kebijakan pemerintah dan permodalan perbankan masih rendah.
22. Belum adanya tim ahli cagar budaya dan tenaga administrasi di Museum Daerah.
23. Masih terbatasnya pengembangan akses dan obyek wisata di titik-titik wisata terkendala status kepemilikan lahan.
24. Masih lemahnya promosi daya tarik wisata Kabupaten Blitar.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembinaan, dengan pembentukan grup-grup pembinaan dengan memanfaatkan media sosial telah dirintis dan dikembangkan sebagai pembinaan, konsultasi dan koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan IKM di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Blitar.
2. Memanfaatkan sampling obyek data IKM sebagai dasar melakukan pembinaan ke daerah maupun pendataan melalui grup-grup media sosial.
3. Pengembangan database sektoral IKM, koperasi, dan peta potensi WTU yang baik dan akurat sebagai dasar kebijakan pengembangan

4. Koordinasi aktif dengan Forum UMKM maupun Dewan Koperasi Daerah terkait rencana penyelenggaraan pelatihan/bimbingan teknis/kegiatan sejenis.
5. Meningkatkan volume dan cakupan tenaga pendamping, proses pendampingan, pelatihan dan monitoring evaluasi.
6. Memasyarakatkan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dan memperbanyak kegiatan penyuluhan, pembinaan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
7. Aktif berkoordinasi dengan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah tingkat SLTA dalam kegiatan koperasi.
8. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang sehingga pengembangan budidaya serelia maupun umbi-umbian dapat dilakukan secara optimal serta membangun koordinasi dan kerjasama intersif dengan stakeholder terkait pangan dan gizi diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Meningkatkan pembangunan sistem irigasi melalui pembangunan JIT (Jaringan Irigasi Tersier), Irigasi Air Tanah Dangkal, Dam Parit dan melakukan rehab pintu air sehingga petani dapat melakukan pembagian atau pengaturan stok air irigasi pada musim kemarau.
10. Meningkatkan pelatihan bagi petani, khususnya pelatihan budidaya pertanian yang dapat menunjang peningkatan intensitas tanam.
11. Sosialisasi dan fasilitasi perubahan sistem pengolahan lahan secara sempurna secara bertahap dilakukan perubahan menjadi pengolahan lahan secara sederhana, dan dukungan kecukupan alat pengolahan lahan seperti traktor atau tenaga kerja untuk pengolahan lahan perlu diperhatikan.
12. Menerapkan program UBSUS SIWAB, yang mewajibkan betina produktif wajib bunting dengan drooping straw berkualitas/ bibit unggul dari Provinsi secara gratis diharapkan bias memberikan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas baik.
13. Koordinasi dengan pihak terkait baik peternak, Dinas Peternakan Prov. Jatim, Kementan dan BULOG dalam rangka memantau ketersediaan bahan pakan ternak berkualitas
14. Penyediaan sarana pengujian berupa laboratorium pakan ternak yang terakreditasi diharapkan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat dalam mengontrol kualitas pakan yang diberikan.

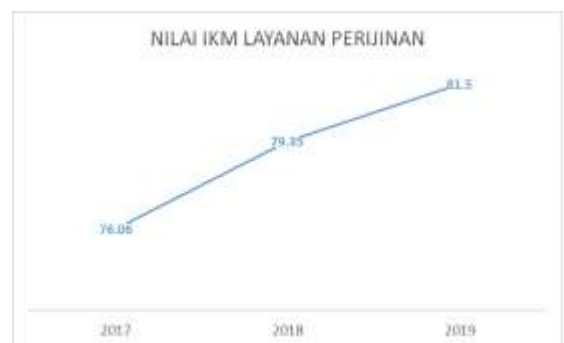
15. Pembinaan dan Pelatihan penerapan teknologi pakan ternak dengan memanfaatkan bahan pakan lokal serta pembinaan dan pelatihan terkait pemanfaatan sumber daya lokal seperti fitobiotik (contoh: jamu- jamuan), probiotik, prebiotik, asam laktat (contoh: ekstrak belimbing wuluh).
16. Ancaman penyakit hewan strategis dapat dicegah dengan pembinaan, pelatihan serta pemberian vaksin berserta desinfektan gratis untuk biosecurity-nya.
17. Melakukan pengajuan tenaga jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam rangka mengatasi keterbatasan SDM Puskesmas serta sarana dan prasarana pencegahan penyakit hewan.
18. Melakukan pembinaan dan pelatihan terkait usaha peternakan yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan usaha peternakan modern yang menerapkan teknologi serta pengolahan produk non pangan asal hewan sehingga diperoleh produk hasil peternakan yang bernilai tinggi.
19. Melakukan sosialisasi tentang bahaya dan akibat pencari ikan diperairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, pelatihan pembuatan jaring ikan sehingga dapat membantu nelayan untuk melakukan penangkapan ikan lebih maksimal.
20. Memfasilitasi bantuan bagi kapal penangkapan ikan melalui kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat.
21. Memperluas dan menambah intensitas pelaksanaan kegiatan “Gemar Makan Ikan” sehingga dapat mempromosikan budaya konsumsi ikan dan produk olahannya yang diharapkan dapat mendorong permintaan produk perikanan dan tingkat konsumsi ikan pada masyarakat.
22. Pelatihan tentang pembuatan pakan ikan utamanya memanfaatkan bahan pakan lokal.
23. Fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ikan pada Unit Pembenihan Ikan dan .pengadaan indukan koi unggul.
24. Mensosialisasikan dan memaksimalkan Perda Cagar Budaya, dan menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi guna penetapan cagar budaya.
25. Melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait (instansi vertikal maupun swasta).
26. Meningkatkan upaya-upaya promosi untuk mengangkat potensi wisata di Kabupaten Blitar, salah satunya memunculkan icon wisata kabupaten Blitar.
27. Penyusunan rencana kebutuhan lahan dan anggaran (pengadaan tanah) dalam pengembangan akses infrastruktur dan sarana prasarana di obyek wisata.

**Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Perijinan**  
**Strategis 10**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	Baik	100%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>100%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Perijinan tercapai 100% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Realisasi investasi di Kabupaten Blitar terus meningkat setiap tahun dengan kemudahan perijinan investasi yang hanya 1 jam selesai. Nilai IKM Pelayanan Perijinan DPMPTSP menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahun. Tahun 2017 nilai IKM sebesar 76,06 poin, dengan menindaklanjuti hasil IKM maka dilakukan kebijakan perbaikan tindak lanjut, sehingga tahun 2018 naik menjadi 79,35 poin dan akhir tahun 2019 meningkat lagi menjadi 81,5 poin.

Berbagai perusahaan nasional dan internasional seperti PT. Perkebunan Dewi Sri, PT. Greenfield, dan PT. Olam Sumber Manis telah menanamkan investasinya di Kabupaten Blitar. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan, meski nilai investasi turun.



Tahun 2018 terdapat 4 investor berskala nasional (PMA/PMDN) dengan jumlah nilai investasi yang tinggi yaitu Rp. 1,8 triliun maka di tahun 2019 jumlah investor berskala nasional berjumlah 12 investor dengan jumlah nilai investasi Rp. 346 milyar. Sementara itu, realisasi investasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Pada tahun 2018 realisasi investasi sebesar Rp. 1,4 triliun sedangkan pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai Rp. 4,6 triliun dengan realisasi investasi kategori PMA sebesar Rp. 1,4 triliun dan realisasi investasi



kategori PMDN sebesar Rp. 3,1 triliun. Untuk kenaikan realisasi investasi PMA pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,2 triliun sementara kenaikan realisasi investasi PMDN pada

tahun 2019 mencapai Rp. 1,9 triliun. Angka realiasi pertumbuhan investasi sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir yaitu 267,68% pertahun.

Berbagai kegiatan promosi investasi daerah dilakukan 11 kali antara lain pameran di Kementerian Luar Negeri, pameran APKASI, pameran di Bandung, pameran EJI di Surabaya, pameran TEI di Jakarta, pameran akhir tahun di Kantor Bupati Blitar, *matchmaking* pelaku usaha di Malang, dan ikut serta dalam kegiatan promosi DPMPTSP Provinsi di Bali, Manado dan Batam, serta disusun buku peta potensi daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi *leading sector* pencapaian sasaran strategis ini dengan realisasi program sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	278.300.000	275.770.167	99,09
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	293.750.000	271.252.932	92,34
Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	377.755.000	374.240.849	99,07
Program Peningkatan Promosi dan sistem Informasi	546.254.804	542.269.691	99,27
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>1.496.059.804</b>	<b>1.463.533.639</b>	<b>97,83</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Fitur pelaporan data investasi pada OSS masih menunggu dan belum ada kepastian jelas sampai kapan adanya penambahan fitur tersebut, hal ini mengakibatkan kita dalam hal ini bidang penanaman modal dan promosi menemui kendala pelaporan investasi yang valid melalui OSS, mengingat kerancuan Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sudah dapat dimasukkan sebagai investasi atau menunggu sampai ijin komitmen didapatkan.
2. Sosialisasi rencana pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) masih perlu perhatian, kepedulian dan tanggungjawab semua OPD baik Pemda maupun OPD yang bersifat vertikal.
3. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur yang kompeten dalam penerapan teknologi informatika, khususnya untuk menuju ke pelayanan online.

Strategi / solusi yang ditempuh adalah ini adalah:

1. Koordinasi dan konsolidasi dengan dinas-dinas teknis dalam rangka sosialisasi tentang maksud dan tujuan pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP).

2. Proaktif koordinasi dalam pemanfaatan informasi terkait perkembangan mekanisme dan fitur OSS serta secara manual berupaya merekapitulasi perijinan yang masuk melalui OSS termasuk penghitungan nilai investasi penanaman modal.
3. Secara rutin dilakukan bimbingan teknis pada seluruh karyawan DPMPTSP dan terus melakukan pengembangan aplikasi perijinan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, diantaranya BKPM, BPS Kabupaten Blitar, Bagian Hukum, dan OPD terkait lainnya.

**Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang  
Strategis 11 Yang Berkelanjutan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,5	68	69,9	102,79%	0,4
Persentase Ketaatan Tata Ruang (%)	80%	80	80	100%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>101,40%</b>	

Capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan adalah 100% atau Kategori **Sangat Berhasil** yang menggunakan 2 (dua) indikator. Capaian kinerja IKLH didukung oleh 3 indikator kinerja lingkungan yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Dari 3 indikator tersebut, 2 indikator tercapai kinerja nya yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan , dan 1 indikator yaitu kualitas air tidak tercapai. Indeks Kualitas Udara terealisasi 99,44 poin melampaui target kinerja ditetapkan yaitu 98,73 poin atau tercapai 100,72% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan terealisasi 50,66 poin yang melampaui target 50,21 poin atau tercapai 100,90%. Sedangkan, untuk Kualitas Air hanya tercapai 93,48% yaitu terealisasi 66 poin dari 70,6 poin target yang ditetapkan.



Berbagai inovasi program prioritas pencapaian kinerja gerakan lingkungan telah dilakukan antara lain 1) Gerakan Blitar Menanam yang diawali di embung umbul desa Karangrejo Garum, 2) Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) yang dilakukan di RTH Kanigoro dan didukung oleh Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik, dan 3) Gerakan Terpadu Kali Bersih (Getar Kasih) sebagai gerakan sadar fungsi sungai dan menjaga kebersihannya didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 dan didukung pembentukan pengurus Forum Kali Bersih, sosialisasi dan pembinaan, kegiatan bersih-bersih sampah di Sungai Tuwuh Kecamatan Kesamben pada tanggal 15 September 2019 dan Sungai Rembang-Plosoarang Kecamatan Sanankulon pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan total peserta mencapai 500 orang. Program ini juga didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang melalui program pengendalian dan kepatuhan tata ruang sesuai dengan RT/RW daerah.

Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. Realisasi atas program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	815.400.000	791.017.832	97,89
Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	286.300.000	261.907.646	91,48
Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	2.686.000.000	2.563.867.553	95,45
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	5.133.145.257	4.394.290.237	85,61
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Sosial	2.900.000.000	2.563.867.553	95,45
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>11.820.845.257</b>	<b>10.574.950.821</b>	<b>89,46</b>

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Perencanaandan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.815.100.000	1.408.778.058	77,61
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>1.815.100.000</b>	<b>1.408.778.058</b>	<b>77,61</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat sehingga masih banyak sampah rumah tangga (domestik) yang dibuang ke sungai.
2. Makin meningkatnya penggunaan produk plastik, sehingga meningkatkan volume sampah dan limbah (terutama plastik sekali pakai).
3. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengajukan ijin pemanfaatan ruang terutama untuk alih fungsi lahan dan bangunan melalui IMB.

Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat melalui gerakan dan aksi bersih sampah bersama pegiat, masyarakat, dan aparat desa, kecamatan, dan kabupaten serta stakeholder terkait.
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik yang mengatur tentang pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai di wilayah Kabupaten Blitar dan pengembangan usaha ekonomi kreatif pemanfaatan berbasis limbah plastik (*reuse*).
3. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menggandeng pemerintah desa.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa**  
**Strategis 12**

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2018	Capaian 2019			Kenaikan / (Penurunan) Realisasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase desa berstatus pratama (%)	0,91	0,91	0,45	150,55%	-
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>150,55%</b>	

Capaian kinerja sasaran strategis dari Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa adalah 150,55% atau Kategori **Sangat Berhasil**. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki 220 pemerintahan desa. Berbagai capaian kinerja pemberdayaan terus meningkat, sehingga banyak desa yang mulai menjadi desa maju dan mandiri. Desa berstatus pratama masih tinggal 1 buah desa atau 0,45% dari seluruh desa. Pembangunan desa terus berkembang yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktif lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, PKK, Karang Taruna dan bahwa LSM, dan membangun menjadi Desa Siaga Aktif. Partisipasi ekonomi terus meningkat dari warganya yang ditunjukkan makin meningkatnya Swadaya Masyarakat di Program Pemberdayaan Masyarakat yang tahun 2019 mencapai Rp.3.990,6 Juta dan malampaui target Rp.3.430,2 juta. Perangkat



Daerah pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis ini yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dengan realisasi program-program sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Desa Dan Kawasan Perdesaan	6.555.220.000	6.460.939.515	98,56
Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	1.001.600.000	974.897.800	97,33
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	2.940.297.000	2.902.462.384	98,71
Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa	1.730.295.000	1.656.627.271	95,74
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>12.227.412.000</b>	<b>11.994.926.970</b>	<b>98,10</b>

b. Bagian Pemerintahan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan	1.848.245.500	1.762.828.868	95.38
<b>Serapan Anggaran</b>	<b>1.848.245.500</b>	<b>1.762.828.868</b>	<b>95.38</b>

Hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

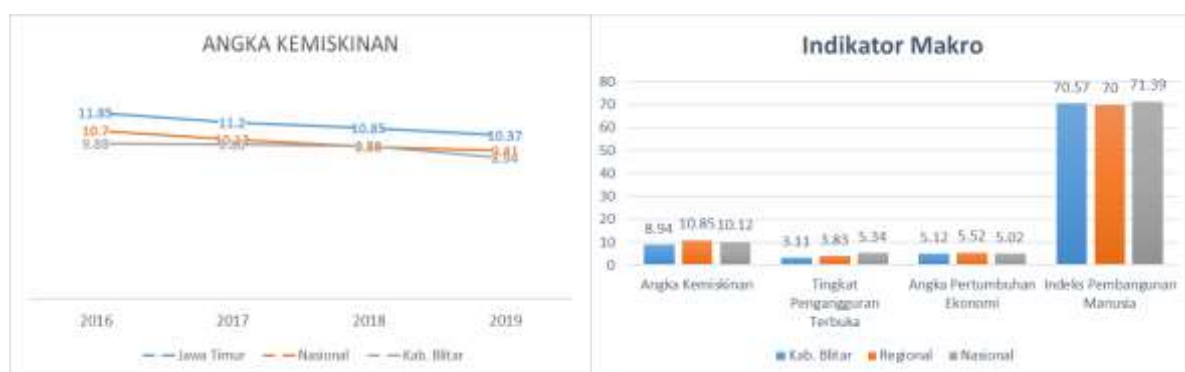
Strategi/solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis adalah:

Peningkatan kuantitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan dan pendampingan melalui: (1) sosialisasi hasil pengukuran perkembangan desa; (2) rapat koordinasi lintas OPD guna sinkronisasi program/ kegiatan yang memiliki target dan sasaran ke desa; (3) penetapan program prioritas masing-masing desa yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa dan APBDes (sesuai pedoman dari Kemendes RI).

Capaian kinerja sasaran strategis memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian kinerja ekonomi makro daerah. Pembandingan capaian kinerja indikator makro ekonomi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana posisi kinerja dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar dibandingkan dengan lingkup regional Jawa Timur dan Nasional. Capaian kinerja indikator makro daerah digambarkan dalam tabel dibawah ini:

### Perbandingan Capaian Beberapa IKU Terhadap Capaian Kinerja Regional dan Nasional

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi Kab. Blitar	Provinsi Jatim	Nasional	Sumber
1	Angka Kemiskinan	8,94	10,85	10,12	BPS
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,11	3,92	5,34	BPS
3	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,12	5,52	5,02	BPS
4	PDRB perkapita (000)	36.447	55.436	56.000	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,57	70,00	71,39	BPS



Kinerja makro ekonomi Kabupaten Blitar menunjukkan tingkat pencapaian kinerja di atas rata-rata jika dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Blitar tahun 2019 sebesar 8,94% dari penduduk yang angka ini di bawah Provinsi Jawa Timur (10,85%) dan Nasional (10,12%). Demikian juga untuk angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian kinerja yang lebih baik yaitu 3,11% dan 70,57 poin. Sedangkan, untuk angka pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita penduduk, angka capaian di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional karena Kabupaten Blitar masih bertumpu pada sektor pertanian yang memiliki nilai tambah produksi rendah.

## 3.2. Serapan Anggaran

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah pendukung. Hasil rekapitulasi capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	9,37	8,94	<b>98,17%</b>	9.551.380.804	8.930.158.061	<b>94,95%</b>	<b>3,22%</b>
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah)	30,8	31,40					
		3. Indeks Daya Beli	0,69	0,7266					
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,61	3,11					
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	81,92	80,01	<b>97,60%</b>	308.307.383.519	250.267.063.161	<b>89,96%</b>	<b>7,76%</b>
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	100%	<b>100%</b>	15.800.450.260	15.515.128.561	<b>98,14%</b>	<b>1,86%</b>
		7. Persentase penegakan PERDA (%)	95%	95%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	0,62	0,5888	<b>93,50%</b>	147.335.416.989	144.725.739.524	<b>95,39%</b>	<b>-0,42%</b>
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	0,8170	0,8214	<b>100,5%</b>	381.299.838.880	351.693.561.047	<b>94,60%</b>	<b>5,90%</b>
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	77,20	79,15	<b>102,53%</b>	1.769.960.150	1.541.690.567	<b>87,10%</b>	<b>15,42%</b>
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pem daerah	11. Nilai SAKIP	B	B	<b>100,77%</b>	45.353.605.553	41.193.042.097	<b>90,94%</b>	<b>9,83%</b>
		12. Nilai LPPD	30,530	31,238					
		13. Opini BPK	WTP	WTP					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	100%	365.094.981.963	341.196.084.397	94,59%	5,41%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	6,63%	1,06%	107,51%	73.172.406.770	67.275.038.127	93,51%	13,99%
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	6,63%	3,39%					
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)	3,05%	1,62%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)	3.486.496	5.742.647					
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100%	1.496.059.804	1.463.533.639	97,83%	2,17%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68	69,9	101,40%	13.635.945.257	11.983.728.879	83,54%	17,86%
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang	80	80					
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	0,91	0,45	150,55%	14.075.657.500	13.757.755.838	96,74%	53,81%
13.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					60.830.894.384,00	60.830.894.384,00	100%	
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					34.637.827.004,00	34.637.827.004,00	100%	
15.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					9.656.026.847,00	9.656.026.847,00	100%	
16.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian					3.142.413.905,00	3.142.413.905,00	100%	

Selama 2019 berbagai prestasi berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai capaian kinerja Pemerintah Daerah. Prestasi tersebut antara lain:

1. Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya,
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019, sekaligus melengkapi capaian kinerja keuangan dengan WTP dalam 5 tahun terakhir,
3. Kabupaten Sehat “Swasti Saba Wistara”,
4. LKS Peduli Lansia,
5. Kabupaten Sangat Inovatif,
6. Wahana Tata Nugraha,
7. “Pastika Parahita” sebagai Kabupaten dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok,
8. Juara II Penilaian POKmaswAS, Pokmaswas Fajar Bengawan, Area Konservasi Badherbank
9. TPID Berprestasi wilayah Jawa dan Bali,
10. Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur,
11. Juara Harapan II Lomba BUMDES Tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk BUMDes Sejahtera Abadi Gogodeso, Kecamatan Kanigoro,
12. Akreditasi paripurna bintang lima “RSUD Ngudi Waluyo Wlingi”
13. dan prestasi tingkat Provinsi dan Daerah lainnya.





## BAB **4** PENUTUP DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, dokumen RKPD 2019, Reviu IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2019. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri atas 6 Misi dan 12 sasaran dan 22 indikator kinerja. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi dan Sasaran pada Perjanjian Kinerja yang bersumber dari RPJMD, maka capaian rata-rata kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 sebesar 104,38% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Dari 22 indikator kinerja, sebanyak 17 atau 77% dapat dicapai dengan Sangat Berhasil (di atas 100%), sebanyak 4 indikator atau 18% dicapai dengan Berhasil dan sisanya 1 indikator atau 5% dicapai dengan Cukup Berhasil. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih rendah dan memerlukan tindak lanjut kebijakan perbaikan di masa mendatang. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan (%)	98,17%	94,95%	3,22%
		2. Pendapatan per kapita (juta rupiah)			
		3. Indeks Daya Beli			
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
2	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	5. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi)	97,60%	89,96%	7,76%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
3.	Terwujudnya stabilitas wilayah	6. Persentase penanganan konflik (%)	100%	98,14%	1,86%
		7. Persentase penegakan PERDA (%)			
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	8. Indeks Pendidikan	93,50%	95,39%	-0,42%
5.	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	9. Indeks Kesehatan	100,5%	94,60%	5,90%
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	10. Indeks Pemberdayaan Gender	102,53%	87,10%	15,42%
7.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	11. Nilai SAKIP	100,77%	90,94%	9,83%
		12. Peringkat Penilaian LPPD Se-Jawa Timur			
		13. Opini BPK			
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14. Peringkat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100%	94,59%	5,41%
9.	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	15. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	107,51%	93,51%	13,99%
		16. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
		(%)			
		17. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)			
		18. Jumlah Pajak Daerah dari sektor usaha kepariwisataan (000 Rp)			
10.	Meningkatnya pelayanan perijinan	19. Predikat IKM Layanan Perijinan	100%	97,83%	2,17%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan dan Pemanfaatan Ruang yang Berkelanjutan	20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101,40%	83,54%	17,86%
		21. Persentase Ketaatan Tata Ruang			
12.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	22. Persentase desa berstatus pratama (%)	150,55%	96,74%	53,81%

## 4.2. Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelaraskan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati dengan RPJMD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Renstra dan target kinerja dengan DPA yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan peningkatan sinkronisasi indikator dan target kinerja antara RPJMD dan Renstra OPD pendukung serta kualitas indikator kinerja dengan memperhatikan unsur-unsur SMART sehingga bisa menghasilkan pelaporan yang lebih akuntabel.
3. Melaksanakan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil

4. Membangun sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dan selaras dengan target-target daerah dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Blitar

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar.